



2021

zv

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

PEMERINTAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERITAH
TAHUN 2021**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**PEMERINTAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

URUS IZIN SENDIRI ITU

MUDAH

SETIA #MelayaniJakarta



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Gedung Mal Pelayanan Publik, Jl. HR. Rasuna Said Kav C 22

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta telah dapat diselesaikan.

LKIP Tahun 2021 DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta disusun sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan laporan ini merupakan upaya untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan pada Tahun 2021, sebagai konsistensi terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik.

LKIP Tahun 2021 DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta memuat informasi tentang penyelenggaraan pelayanan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Akhir kata, disampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKIP Tahun 2021 DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta.

Jakarta, 31 Januari 2022
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta



Benni Aguscandra
NIP. 196908081997031004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	v
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	1
C. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DPMPSTSP PROVINSI DKI JAKARTA	2
D. SUMBER DAYA MANUSIA	5
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA	7
A. RENCANA STRATEGIS	7
1. VISI	7
2. MISI	7
3. TUJUAN DAN SASARAN	8
4. INDIKATOR KINERJA	10
B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2021	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	19
1. TARGET DAN REALISASI KINERJA	20
2. REALISASI KINERJA TAHUN 2021 DIBANDINGKAN CAPAIAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	39
3. REALISASI KINERJA DAN TARGET TAHUN 2021 DIBANDINGKAN DENGAN TARGET NASIONAL	46
4. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN, TANTANGAN DAN PENINGKATAN KINERJA	48
5. ANALISIS ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA	62
6. ANALISIS PROGRAM YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENYAMPAIAN PERNYATAAN KINERJA	68
B. REALISASI ANGGARAN	77
C. PENGHARGAAN	82
BAB IV PENUTUP	84

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam mewujudkan *Good Governance*, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2021 sebagai bentuk aplikasi dari penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Terdapat empat puluh dua indikator kinerja yang termuat dalam Perjanjian Kinerja DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 yang telah diselaraskan dengan dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022 dan Rencana Strategis DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022 serta program prioritas Pemerintah provinsi DKI Jakarta lainnya. Dari empat puluh dua indikator tersebut sebanyak 38 indikator tercapai 100 persen, 2 indikator tercapai 98 persen, 2 indikator tercapai masing-masing 99 persen dan 96 persen.

Jumlah alokasi anggaran yang dialokasikan untuk mencapai target tersebut sebesar Rp.684.584.394.547,- dengan penyerapan sebesar Rp. 656.181.882.571,- atau 95,85%. Anggaran tersebut terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp.682.043.394.547,- dengan penyerapan sebesar Rp. 653.732.732.571,- atau 95,85% dan Belanja Modal sebesar Rp.2.541.000.000,- dengan penyerapan sebesar Rp. 2.449.150.000,- atau 96,39%.



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Upaya reformasi birokrasi dan regulasi yang mengatur tentang kegiatan usaha telah dianggap sebagai dasar tata kelola pemerintahan yang baik dan merupakan suatu kondisi yang sangat dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Salah satu upaya reformasi birokrasi tersebut dilakukan melalui reformasi birokrasi perizinan dan non perizinan. Upaya yang dilakukan dalam reformasi birokrasi tersebut adalah mengurangi dan mempersingkat jumlah maupun waktu administrasi pengurusan berbagai prosedur yang harus dilalui oleh pelaku usaha.

Untuk mewujudkan reformasi birokrasi dalam perizinan dan non perizinan maka dibentuklah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta, sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta serta Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintah yang jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan capaian keberhasilan dan kegagalan capaian target sasaran dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2021 dan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil

pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

2. TUJUAN

- a. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. Menjadikan DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta akuntabel, sehingga dapat berperan secara efektif, efisien, ekonomis dan responsif terhadap aspirasi masyarakat;
- c. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021; dan
- d. Hasil evaluasi akan menjadi acuan perbaikan untuk meningkatkan kinerja DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta di tahun selanjutnya serta masa yang akan datang.

C. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DPMPTSP PROVINSI DKI JAKARTA

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja DPMPTSP, DPMPTSP merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan. DPMPTSP mempunyai tugas pelayanan dan penandatanganan izin dan non izin yang menjadi kewenangannya serta melaksanakan perencanaan, pengembangan, pelayanan pengaduan dan komunikasi masyarakat, pengelolaan sistem teknologi informatika dan atas penyelenggaraan PMPTSP.

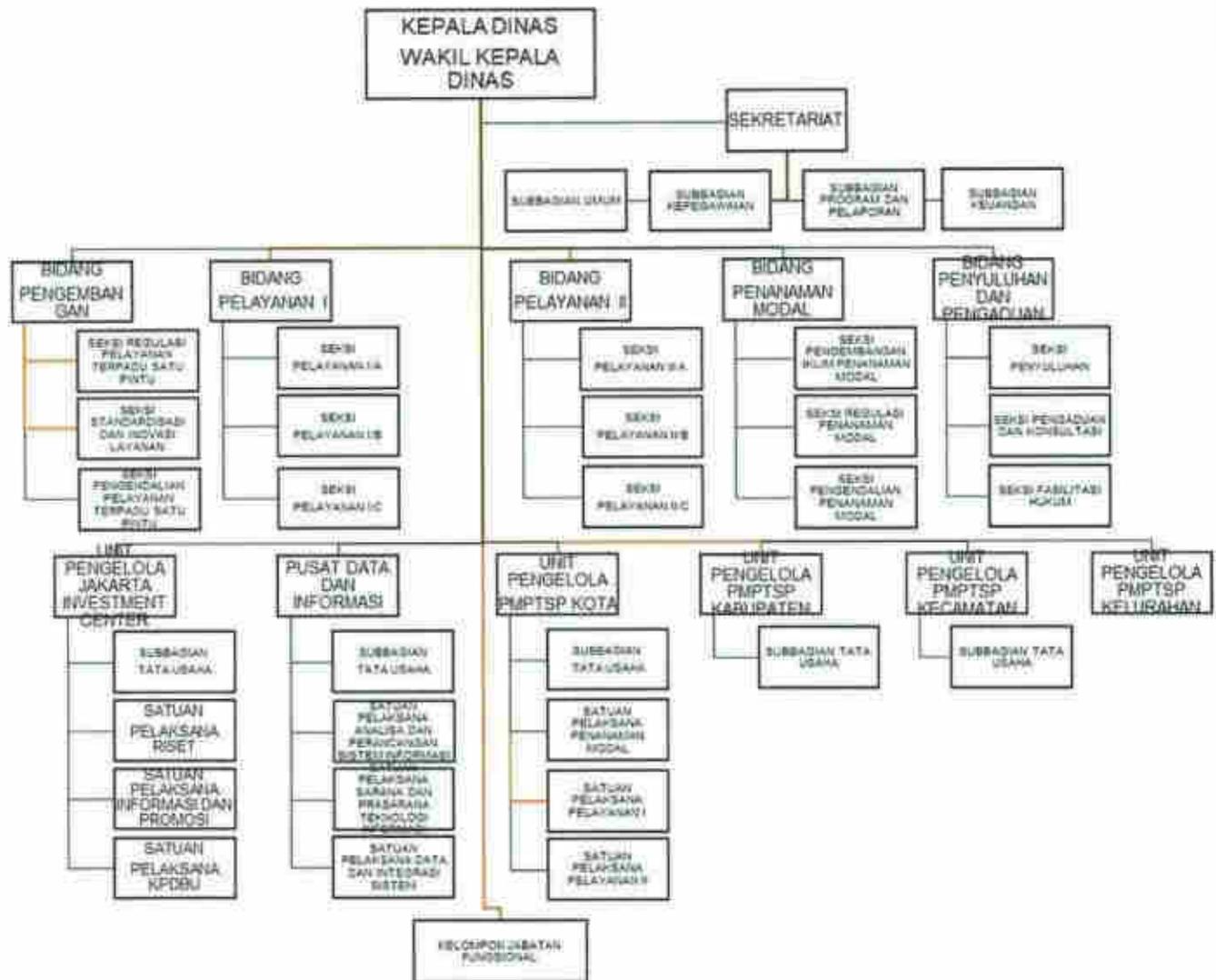
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi:

- a. penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
- b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas;
- c. perumusan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Dinas;
- d. perumusan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Dinas;

- e. penyelenggaraan penanaman modal;
- f. penyelenggaraan pelayanan perizinan/non perizinan;
- g. penandatanganan dan penyerahan dokumen izin, non izin dan administrasi sesuai kewenangannya;
- h. penetapan dan pemberian sanksi terhadap penyalahgunaan izin dan non izin serta dokumen administrasi sesuai kewenangannya;
- i. pengelolaan arsip dokumen izin, non izin dan administrasi sesuai kewenangannya;
- j. pengelolaan data dan sistem teknologi informasi Dinas;
- k. pelayanan penyuluhan, penyelesaian pengaduan/keluhan, masyarakat serta fasilitasi hukum atas penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- l. pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
- m. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; dan
- n. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan/ atau Sekretaris Daerah.

Struktur organisasi dan tata kerja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah sebagai berikut.

**Bagan Susunan Organisasi
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**



Sumber : Pergub Provinsi DKI Jakarta No 160 Tahun 2019

D. SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah PNS pada DPMPTSP terhitung sampai dengan 31 Desember 2021 berjumlah 1.242 orang. Jumlah PNS tersebut masih jauh dari kata cukup untuk jumlah pegawai dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan. Oleh karena itu upaya yang dilakukan untuk mengatasi kekurangan pegawai antara lain dengan penambahan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan meliputi Juru Ukur ISI, Penunjang Juru Ukur, Petugas Antar Jemput Izin Bermotor (AJIB), Petugas Informasi dan Konsultasi (Call Center), Petugas Customer Relation, Arsitek Perizinan, Inspektur Bangunan, Petugas Site Office Manager, Petugas Community Manager, Pekerja Harian Lepas (PHL) dan Caraka dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.4 Rekapitulasi Jumlah Pegawai Non PNS Menurut Pendidikan Di Lingkungan DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta

Jabatan	Jumlah
Juru Ukur	117
Penunjang Juru Ukur	137
Pengolah Data	96
Petugas Antar Jemput Izin Bermotor (AJIB)	200
Petugas Informasi dan Konsultasi (Call Center)	28
Petugas Customer Relation	300
Arsitek Perizinan	16
Inspektur Bangunan	14
Petugas Site Office Manager	1
Petugas Community Manager	1
Pekerja Harian Lepas (PHL)	380
Caraka	55
Total	1.345

Sumber: Subbag Kepegawaian DPMPTSP

Secara keseluruhan jumlah sumber daya manusia PNS dan Non PNS di lingkungan DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta berjumlah 2.587 orang.



"Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk terus bisa amanah, bekerja dengan sepenuh hati sehingga bisa tuntas dalam melayani semua kebutuhan Dasar dan Hak Sipil dan Warga yang ada di Jakarta. Mari kita bersama wujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang baik, yang Prima. Perlu mengurus izin? Tidak perlu minta bantuan pihak ketiga, bisa urus sendiri. Di Jakarta Urus Izin Sendiri itu Mudah, pastikan Anda mengurus perizinan sendiri dan insyaallah Anda akan merasakan kemudahannya"

Anies Baswedan, Gubernur Provinsi DKI Jakarta



BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis DPMPTSP tahun 2017-2022 di bentuk dari Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang berorientasi pada apa yang hendak di capai dalam kurun waktu tertentu sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi), pada hakekatnya didalam Renstra merupakan pernyataan komitmen jangka menengah mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja beserta cara pencapaiannya. Hal ini bertujuan untuk dapat meningkatkan produktivitas dan akuntabilitas kinerja seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan DPMPTSP melalui perencanaan yang efektif dan terarah serta pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada hasil dan penyusunan laporan, pengendalian serta evaluasi kegiatan guna meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya secara berkesinambungan

1. VISI

Visi DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta adalah

"Solusi Investasi dan Perizinan di Jakarta"

2. MISI

Untuk menjabarkan visi tersebut, maka misi DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta adalah:

- 1) Meningkatkan nilai investasi melalui promosi, penyempurnaan peraturan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal dengan memanfaatkan sistem teknologi informasi;
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan melalui penciptaan inovasi layanan berbasis sistem teknologi informasi;
- 3) Mengelola pengaduan masyarakat dengan berbasis *quick response*;
- 4) Melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur DPMPTSP sesuai kompetensi;
- 5) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan yang memadai dan handal.

3. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta Periode Tahun 2021 adalah :

**Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Periode Tahun 2021
DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran
	Meningkatkan investasi di Provinsi DKI Jakarta	Meningkatnya pertumbuhan investasi	Realisasi investasi (Triliun rupiah)	94
		Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan perizinan dan non perizinan melalui penyenggaraan layanan perizinan dan non perizinan secara online	Indeks tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan PTSP	90
		Meningkatnya Pelayanan Perijinan dan non Perijinan yang diselenggarakan secara online	Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan secara online	100%
		Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	91%

Sumber: Rancangan Perubahan Renstra DPMPTSP 2017-2022 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Definisi operasional dari indikator dalam tujuan dan sasaran DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta adalah:

1) Realisasi Investasi

Realisasi investasi adalah Jumlah nilai penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing yang diterbitkan oleh BKPM.

2) Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.

3) Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan secara Online

Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan secara online adalah jumlah jenis layanan perizinan dan non perizinan yang sudah diselenggarakan secara online dibandingkan dengan seluruh jumlah jenis layanan perizinan dan non perizinan.

4) Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dilakukan dengan mengukur 3 komponen yaitu:

- a. Penyerapan Anggaran. Komponen ini mengukur kesesuaian realisasi anggaran dibandingkan dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan di lingkungan Perangkat Daerah. Nilai penyerapan anggaran maksimal adalah 40%. Penyerapan anggaran bernilai 40% apabila serapan anggaran $\geq 80\%$, apabila serapan anggaran dibawah $< 80\%$ maka perhitungan nilai penyerapan anggaran = (Persentase Serapan Anggaran x 40%). Anggaran yang dipehitungkan meliputi APBD dan BLU, dan tidak termasuk dana transfer dari pemerintah pusat.

- b. Efisiensi adalah sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dari sub kegiatan yang target sasaran telah dicapai. Apabila pencapaian output tidak tercapai 100% maka unsur efisiensi tidak diukur. Sisa dana adalah selisih lebih pagu anggaran dengan realisasi anggaran dimana selisih lebih pagu dimaksud sudah tidak dialihkan kembali untuk subkegiatan/belanja lainnya.
- c. Pencapaian output adalah persentase capaian indikator kinerja subkegiatan (output). Realisasi pencapaian output dapat dilihat dalam aplikasi e-monev anggaran hasil inputan PD/UKPD.

4. INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan. Indikator kinerja DPMPSTSP Provinsi DKI Jakarta perlu ditetapkan karena secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Organisasi Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DPMPSTSP Provinsi DKI Jakarta ditampilkan berikut ini :

Tabel 2.2 Matriks Indikator Kinerja DPMPSTSP Provinsi DKI Jakarta Berdasarkan RPJMD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (tahun 2017)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1.	Realisasi Investasi	Rp 55 T	Rp 93,10 T	Rp 100,20 T	Rp 107,8 T	Rp 115,90 T	Rp 124,50 T	Rp 541,50 T
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat	0	80,00	83,00	86,00	88,00	88,50	88,50

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (tahun 2017)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
3.	Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan secara online	80,29%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Indeks Kepuasan Layanan Kantor	-	4	4	4	4	4	4
5.	Indeks Kepuasan Kendaraan Dinas Operasional	-	4	4	4	4	4	4

Sumber: RPJMD Tahun 2017-2022

B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2021

Perjanjian Kinerja DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta disusun berdasarkan target kinerja tahun kedua dari RPJMD Provinsi DKI Jakarta, yang diselaraskan dengan Renstra DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta yang memuat sasaran strategis Indikator Kinerja yang terkait dengan tugas fungsi DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta.

Dalam penetapan kinerja tersebut Kepala DPMPTSP dan Wakil Kepala DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta berjanji akan mewujudkan target kinerja berupa :

Tabel 2.3 Matriks Sasaran Strategis, Indikator Kinerja serta Target DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2021	
			Target	Satuan
1	Meningkatkan Investasi di Provinsi DKI Jakarta	Pertumbuhan Nilai Investasi	2,6	Persentase
2	Meningkatnya pertumbuhan investasi	Realisasi Nilai Investasi	94	Triliun

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2021	
			Target	Satuan
3	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan perizinan dan non perizinan melalui penyenggaraan layanan perizinan dan non perizinan secara online	Indeks tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan PTSP	90	Indeks
4	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	91	Persentase
5	Terjaminnya Akses dan Layanan Pendidikan, Kesehatan dan peningkatan keberdayaan yang berkualitas bagi semua	Persentase Penyelesaian Rencana Aksi Penyediaan Jaminan Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas dan Integratif (nomor 12)	100	Persentase
6	Meningkatnya pertumbuhan investasi	Persentase Penyelesaian Rencana Aksi Pelaksanaan Reform Perizinan untuk Percepatan Ease of Doing Business (EODB) (nomor 17)	100	Persentase
7	Meningkatnya pertumbuhan investasi	Persentase Penyelesaian Rencana Aksi Optimalisasi Mall Pelayanan Publik melalui Peningkatan Peran Jakarta Investment Center (JIC) dalam Peningkatan Investasi (nomor 18)	100	Persentase
8	Meningkatnya kewirausahaan baru	Persentase Penyelesaian Rencana Aksi Program Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (nomor 20)	100	Persentase

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2021	
			Target	Satuan
9	Meningkatnya akses sanitasi layak	Persentase Penyelesaian Rencana Aksi Pengembangan dan Pengelolaan Air Limbah dan Air Limbah Komunal (nomor 22)	100	Persentase
10	Meningkatnya fungsi dan pengelolaan infrastruktur pengendalian banjir dan abrasi	Persentase Penyelesaian Rencana Aksi Pengendalian Banjir melalui Naturalisasi Sungai, Pembangunan Waduk/ Situ/ Embung, Revitalisasi Sistem Polder dan Tanggul Pantai (nomor 23)	100	Persentase
11	Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga jakarta	Persentase Penyelesaian Rencana Aksi Penciptaan Layanan Transportasi Terintegrasi melalui Jak Lingko (nomor 29)	100	Persentase
12	Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga jakarta	Persentase Penyelesaian Rencana Aksi Pembangunan dan Pengoperasian Light Rail Transit (LRT) (nomor 31)	100	Persentase
13	Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga jakarta	Persentase Penyelesaian Rencana Aksi Pembangunan Fasilitas Park and Ride dan Optimalisasi Manajemen Perparkiran (nomor 35)	100	Persentase
14	Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga jakarta	Persentase Penyelesaian Rencana Aksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Sepeda (nomor 36)	100	Persentase

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2021	
			Target	Satuan
15	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase Penyelesaian Rencana Aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA (nomor 39)	100	Persentase
16	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase Penyelesaian Rencana Aksi Perbaikan Tata Kelola Rumah Susun Sederhana Sewa dan Rumah Susun Milik (nomor 58)	100	Persentase
17	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase Penyelesaian Rencana Aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan (nomor 61)	100	Persentase
18	Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya	Persentase Penyelesaian Rencana Aksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Masyarakat (nomor 45)	100	Persentase
19	Terbangunnya kota yang berwawasan tata ruang dan lingkungan sebagai perwujudan kota yang berkelanjutan dan lestari	Persentase Penyelesaian Rencana Aksi Pengelolaan Kawasan Pesisir Teluk Jakarta melalui Penyusunan Rencana Kebijakan dan Agenda Rehabilitasi Ekosistem Pesisir Jakarta Termasuk Audit Lingkungan Pulau Reklamasi (nomor 53)	100	Persentase
20	Terbangunnya kota yang berwawasan tata ruang dan lingkungan sebagai perwujudan kota yang berkelanjutan dan lestari	Persentase Penyelesaian Rencana Aksi Pengendalian Pencemaran Udara (nomor 71)	100	Persentase

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2021	
			Target	Satuan
21	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel serta berbasis teknologi informasi	Persentase Penyelesaian Rencana Aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) (nomor 63)	100	Persentase
22	Terwujudnya Jakarta kota tangguh bencana	Persentase Penyelesaian Rencana Aksi Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim (nomor 72)	100	Persentase
23	Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta	Persentase Penyelesaian Rencana Aksi Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian (nomor 73)	100	Persentase
24	Terselesaikannya izin lokasi tepat waktu	Persentase penyelesaian izin lokasi tepat waktu	100	Persentase
25	Terselesaikannya Informasi Rencana Kota (IRK)	Persentase penyelesaian Informasi Rencana Kota (IRK)	100	Persentase
26	Terselesaikannya Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR)	Persentase penyelesaian Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR)	100	Persentase
27	Terselesaikannya Gambar Perencanaan Arsitektur (GPA)	Persentase penyelesaian Gambar Perencanaan Arsitektur (GPA)	100	Persentase
28	Terselesaikannya TABG (Tim Ahli Bangunan Gedung)	Persentase penyelesaian TABG (Tim Ahli Bangunan Gedung)	100	Persentase
29	Terselesaikannya Izin Dewatering	Persentase penyelesaian Izin Dewatering	100	Persentase
30	Terselesaikannya Analisa Dampak Lingkungan (Amdal)	Persentase penyelesaian Analisa Dampak Lingkungan (Amdal)	100	Persentase
31	Terselesaikannya Analisa Dampak Lalu Lintas (Andalalin)	Persentase penyelesaian Analisa Dampak Lalu Lintas (Andalalin)	100	Persentase

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2021	
			Target	Satuan
32	Terselesaikannya Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Persentase penyelesaian Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	100	Persentase
33	Terselesaikannya izin usaha untuk peserta Jakpreneur	Persentase pemberian izin usaha untuk peserta Jakpreneur	90	Persentase
34	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemanfaatan E-Order	100	Persentase
35	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Opini laporan keuangan daerah	3	WTP
36	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	100	Persentase
37	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2021	81	Predikat
38	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	Nilai PMPRB	92	Nilai
39	Suksesnya Penyerapan PEN 2021	Persentase terselesaikannya penerbitan rekomendasi teknis dokumen lingkungan infrastruktur pengendalian banjir yang dibiayai oleh Pinjaman PEN	100	Persentase
40	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	100	Persentase

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2021	
			Target	Satuan
41	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	100	Persentase
42	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	100	Persentase

Sumber : Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Terdapat penyesuaian target kinerja pada dokumen RPJMD dan Renstra yakni pada indikator Realisasi Nilai Investasi tertulis pada dokumen RPJMD dan Renstra sebesar 115,9 Triliun menjadi 94 triliun pada dokumen perjanjian kinerja dikarenakan ada proyeksi kondisi ekonomi tahun 2021 yang mengalami tekanan karena masih terdampak pandemi *covid 19*.

Dalam rangka mewujudkan target tersebut DPMPTSP mengalokasikan anggaran sebesar:

Tabel 2.4 Alokasi Anggaran DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Promosi Penanaman Modal	Rp 976.121.940	APBD
2	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp 650.350.000	APBD
3	Pengendalian Penanaman Modal	Rp 883.470.180	APBD
4	Pelayanan Penanaman Modal	Rp 113.852.567.239	APBD
5	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp 9.234.573.400	APBD
6	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 558.065.861.788	APBD
7	Pemerintahan dan Otonomi daerah	Rp 921.450.000	APBD
	TOTAL	Rp 684.584.394.547	APBD

Sumber : DPA DPMPTSP 2021 (diolah)



S.E.T.I.A

SOLUSI, EMPATI, TEGAS, INOVASI, ANDAL

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

85 s/d 100	:	Sangat Berhasil
70 s/d <85	:	Berhasil
55 s/d < 70	:	Cukup Berhasil
0 s/d < 55	:	Kurang Berhasil

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0. Pada bagian ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. TARGET DAN REALISASI KINERJA

Sampai dengan Tahun 2021, realisasi kinerja DPMPSTSP Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Target dan Realisasi Kinerja DPMPSTSP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
					Persen	Ordinal	Predikat
1	Meningkatkan Investasi di Provinsi DKI Jakarta	Pertumbuhan Nilai Investasi	2,6	3,8	146,15 %	100	Sangat Berhasil
2	Meningkatnya pertumbuhan investasi	Realisasi Nilai Investasi	94	98,59	104,88 %	100	Sangat Berhasil
3	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan perizinan dan non perizinan melalui penyenggaraanlayanan perizinan dan non perizinan secara online	Indeks tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan PTSP	90	90,09	100,10 %	100	Sangat Berhasil
4	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	91	89,88	98,77%	98	Sangat Berhasil
5	Terjaminnya Akses dan Layanan Pendidikan, Kesehatan dan peningkatan kebudayaan yang berkualitas bagi semua	Persentase Penyelesaian Rencana Aksi Penyediaan Jaminan Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas dan Integratif (nomor 12)	100	100	100,00 %	100	Sangat Berhasil
6	Meningkatnya pertumbuhan investasi	Persentase Penyelesaian Rencana Aksi Pelaksanaan Reform Perizinan untuk Percepatan Ease of Doing Business (EODB) (nomor 17)	100	100	100,00 %	100	Sangat Berhasil
7	Meningkatnya pertumbuhan investasi	Persentase Penyelesaian Rencana Aksi Optimalisasi Mall Pelayanan Publik melalui Peningkatan Peran Jakarta Investment Center (JIC) dalam Peningkatan Investasi (nomor 18)	100	100	100,00 %	100	Sangat Berhasil
8	Meningkatnya kewirausahaan baru	Persentase Penyelesaian Rencana Aksi Program Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (nomor 20)	100	100	100,00 %	100	Sangat Berhasil

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
					Persen	Ordinal	Predikat
9	Meningkatnya akses sanitasi layak	Persentase Penyelesaian Rencana Aksi Pengembangan dan Pengelolaan Air Limbah dan Air Limbah Komunal (nomor 22)	100	96	96,00%	96	Sangat Berhasil
10	Meningkatnya fungsi dan pengelolaan infrastruktur pengendalian banjir dan abrasi	Persentase Penyelesaian Rencana Aksi Pengendalian Banjir melalui Naturalisasi Sungai, Pembangunan Waduk/ Situ/ Embung, Revitalisasi Sistem Polder dan Tanggul Pantai (nomor 23)	100	100	100,00 %	100	Sangat Berhasil
11	Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta	Persentase Penyelesaian Rencana Aksi Penciptaan Layanan Transportasi Terintegrasi melalui Jak Lingko (nomor 29)	100	100	100,00 %	100	Sangat Berhasil
12	Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta	Persentase Penyelesaian Rencana Aksi Pembangunan dan Pengoperasian Light Rail Transit (LRT) (nomor 31)	100	100	100,00 %	100	Sangat Berhasil
13	Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta	Persentase Penyelesaian Rencana Aksi Pembangunan Fasilitas Park and Ride dan Optimalisasi Manajemen Perparkiran (nomor 35)	100	100	100,00 %	100	Sangat Berhasil
14	Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta	Persentase Penyelesaian Rencana Aksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Sepeda (nomor 36)	100	98	98,00%	98	Sangat Berhasil
15	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase Penyelesaian Rencana Aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA (nomor 39)	100	100	100,00 %	100	Sangat Berhasil

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
					Persen	Ordinal	Predikat
16	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase Penyelesaian Rencana Aksi Perbaikan Tata Kelola Rumah Susun Sederhana Sewa dan Rumah Susun Milik (nomor 58)	100	100	100,00 %	100	Sangat Berhasil
17	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase Penyelesaian Rencana Aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan (nomor 61)	100	100	100,00 %	100	Sangat Berhasil
18	Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya	Persentase Penyelesaian Rencana Aksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Masyarakat (nomor 45)	100	99	99,00%	99	Sangat Berhasil
19	Terbangunnya kota yang berwawasan tata ruang dan lingkungan sebagai perwujudan kota yang berkelanjutan dan lestari	Persentase Penyelesaian Rencana Aksi Pengelolaan Kawasan Pesisir Teluk Jakarta melalui Penyusunan Rencana Kebijakan dan Agenda Rehabilitasi Ekosistem Pesisir Jakarta Termasuk Audit Lingkungan Pulau Reklamasi (nomor 53)	100	100	100,00 %	100	Sangat Berhasil
20	Terbangunnya kota yang berwawasan tata ruang dan lingkungan sebagai perwujudan kota yang berkelanjutan dan lestari	Persentase Penyelesaian Rencana Aksi Pengendalian Pencemaran Udara (nomor 71)	100	100	100,00 %	100	Sangat Berhasil
21	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel serta berbasis teknologi informasi	Persentase Penyelesaian Rencana Aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) (nomor 63)	100	100	100,00 %	100	Sangat Berhasil
22	Terwujudnya Jakarta kota tangguh bencana	Persentase Penyelesaian Rencana Aksi Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim (nomor 72)	100	100	100,00 %	100	Sangat Berhasil
23	Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta	Persentase Penyelesaian Rencana Aksi Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian (nomor 73)	100	100	100,00 %	100	Sangat Berhasil

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
					Persentase	Ordinal	Predikat
24	Terselesainya izin lokasi tepat waktu	Persentase penyelesaian izin lokasi tepat waktu	100	100	100,00 %	100	Sangat Berhasil
25	Terselesainya Informasi Rencana Kota (IRK)	Persentase penyelesaian Informasi Rencana Kota (IRK)	100	100	100,00 %	100	Sangat Berhasil
26	Terselesainya Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR)	Persentase penyelesaian Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR)	100	100	100,00 %	100	Sangat Berhasil
27	Terselesainya Gambar Perencanaan Arsitektur (GPA)	Persentase penyelesaian Gambar Perencanaan Arsitektur (GPA)	100	100	100,00 %	100	Sangat Berhasil
28	Terselesainya TABG (Tim Ahli Bangunan Gedung)	Persentase penyelesaian TABG (Tim Ahli Bangunan Gedung)	100	100	100,00 %	100	Sangat Berhasil
29	Terselesainya Izin Dewatering	Persentase penyelesaian Izin Dewatering	100	100	100,00 %	100	Sangat Berhasil
30	Terselesainya Analisa Dampak Lingkungan (Amdal)	Persentase penyelesaian Analisa Dampak Lingkungan (Amdal)	100	100	100,00 %	100	Sangat Berhasil
31	Terselesainya Analisa Dampak Lalu Lintas (Andalalin)	Persentase penyelesaian Analisa Dampak Lalu Lintas (Andalalin)	100	100	100,00 %	100	Sangat Berhasil
32	Terselesainya Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Persentase penyelesaian Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	100	100	100,00 %	100	Sangat Berhasil
33	Terselesainya izin usaha untuk peserta Jakpreneur	Persentase pemberian izin usaha untuk peserta Jakpreneur	90	100	111,11 %	100	Sangat Berhasil
34	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemanfaatan E-Order	100	100	100,00 %	100	Sangat Berhasil
35	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Opini laporan keuangan daerah	3	3	100,00 %	100	Sangat Berhasil
36	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	100	100	100,00 %	100	Sangat Berhasil

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
					Persentase	Ordinal	Predikat
37	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2021	81	86,86	107,23 %	100	Sangat Berhasil
38	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	Nilai PMPRB	92	92	100,00 %	100	Sangat Berhasil
39	Suksesnya Penyerapan PEN 2021	Persentase terselesainya perbitan rekomendasi teknis dokumen lingkungan infrastruktur pengendalian banjir yang dibiayai oleh Pinjaman PEN	100	100	100,00 %	100	Sangat Berhasil
40	Terselesainya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	100	100	100,00 %	100	Sangat Berhasil
41	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	100	100	100,00 %	100	Sangat Berhasil
42	Terselesainya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	100	100	100,00 %	100	Sangat Berhasil
Rata-Rata Capaian Kinerja					101,48 %	100	Sangat Berhasil

Dari tabel diatas dapat dilihat capaian atas indikator kinerja DPMPTSP bila dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal kedua target indikator kinerja memperoleh capaian berhasil dengan rata-rata nilai capaian kinerja DPMPTSP sebesar 100% dapat dikategorikan sangat berhasil.

a. Jumlah realisasi investasi penanaman modal di provinsi DKI Jakarta

Jumlah realisasi investasi penanaman modal di provinsi DKI Jakarta menjadi indikator utama untuk menilai pertumbuhan investasi di provinsi DKI Jakarta. Capaian kinerja jumlah realisasi investasi pada tahun 2021 yakni sebesar Rp. 98,59 Triliun dari target sebesar 94 Triliun atau tercapai sebesar 104,88% dan masuk dalam kategori berhasil. Hal ini disebabkan

membbaiknya iklim penanaman modal di Provinsi DKI Jakarta sehingga memberikan kepercayaan investor untuk menanamkan modal di Jakarta. Perbaikan infrastruktur dan banyaknya program pemerintah di bidang pembangunan juga turut meningkatkan minat investor untuk berinvestasi di Jakarta. Dan jika dibandingkan dengan target tahunan maka capaian indikator ini telah tercapai 85%.

b. Indeks Tingkat kepuasan masyarakat

Capaian kinerja indeks kepuasan masyarakat pada tahun 2021 sebesar 90,09 dari target sebesar 90 atau tercapai sebesar 100% dan masuk dalam kategori sangat berhasil. Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya maka terdapat kenaikan sebesar 0,1% yakni dari 89,99 pada tahun 2021 menjadi 90,09 pada tahun 2021. Dan jika dibandingkan dengan target jangka menengah maka capaian indikator ini telah tercapai 102%.

c. Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan secara online

Capaian persentase layanan perizinan dan non perizinan secara online tahun 2021 adalah 100%. Jika dibandingkan dengan target tahun 2021 maupun target jangka menengah maka indikator ini telah tercapai 100%.

d. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dilakukan dengan mengukur 3 Komponen yaitu:

1. Penyerapan Anggaran. Komponen ini mengukur kesesuaian realisasi anggaran dibandingkan dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan di lingkungan Perangkat Daerah. Nilai penyerapan anggaran maksimal adalah 40%. Penyerapan anggaran bernilai 40% apabila serapan anggaran $\geq 80\%$. Apabila serapan anggaran di bawah $< 80\%$ maka perhitungan nilai penyerapan anggaran = (Persentase Serapan Anggaran x 40%). Anggaran yang diperhitungkan meliputi APBD dan BLU, dan tidak termasuk dana transfer dari pemerintah pusat.

2. Efisiensi adalah sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dari subkegiatan yang target sasaran telah dicapai. Apabila pencapaian output tidak tercapai 100% maka unsur efisiensi tidak diukur. Sisa dana adalah selisih lebih pagu anggaran dengan realisasi anggaran dimana selisih lebih pagu dimaksud sudah tidak dialihkan kembali untuk subkegiatan/belanja lainnya.
3. Pencapaian output adalah persentase capaian indikator kinerja subkegiatan (output). Realisasi pencapaian output dapat dilihat dalam aplikasi e-monev Anggaran hasil inputan PD/UKPD

Metode Pengukuran dengan Formulasi pengukuran adalah sebagai berikut:

1. Serapan Anggaran $\geq 80\%$ dan output 100%

$$\text{Realisasi} = (40\%) + ((\% \text{efisiensi} \times 10\%) / 20\%) + (50\%)$$

2. Serapan Anggaran $< 80\%$ dan output $< 100\%$

$$\text{Realisasi} = (\text{Penyerapan Anggaran} \times 40\%) + (\text{pencapaian output} \times 50\%)$$

3. Serapan Anggaran $\geq 80\%$, namun output $< 100\%$

$$\text{Realisasi} = (40\%) + (\text{pencapaian output} \times 50\%)$$

Realisasi indikator ini sebesar 89,88 persen atau tercapai 98,77 % dan masuk dalam kelompok predikat sangat berhasil

e. Persentase Penyelesaian Rencana Aksi Penyediaan Jaminan Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas dan Integratif (nomor 12)

Output dari KSD ini adalah tersusunnya rekomendasi investasi di bidang kesehatan di Provinsi DKI Jakarta pada triwulan 3 atau B09 dengan capaian 100 persen Rekomendasi investasi di bidang kesehatan di Provinsi DKI Jakarta tersusun yang didalamnya memuat rekomendasi investasi kesehatan terkait layanan telemedicine dalam pelayanan kesehatan serta peluang pengelolaan limbah medis

f. Persentase Penyelesaian Rencana Aksi Pelaksanaan Reform Perizinan untuk Percepatan Ease of Doing Business (EODB) (nomor 17)

Terdapat 3 rencana aksi utama dalam KSD ini yakni:

1. Penilaian dan Ranking Pelayanan Unit PTSP dengan output berupa tersusunnya penilaian dan ranking pelayanan Unit PTSP secara online setiap triwulan.
2. Pelaksanaan Reformasi Perizinan dengan output Revisi PerGub No 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan PTSP, Tersusunnya Revisi Pergub No 130 Tahun 2012 tentang Tim Ahli Bangunan Gedung, Tersusunnya Revisi Pergub No 132 Tahun 2007 tentang Izin Pelaku Teknis Bangunan (IPTB) dan Revisi Pergub No 147 Tahun 2018 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
3. Digitalisasi Rekomendasi Teknis Perangkat Daerah ke Jakevo dalam Pelayanan Perizinan dengan output Digitalisasi rekomendasi teknis perangkat daerah ke Jakevo dalam pelayanan perizinan

Seluruh output pada KSD tersebut tercapai 100 persen

g. Persentase Penyelesaian Rencana Aksi Optimalisasi Mall Pelayanan Publik melalui Peningkatan Peran Jakarta Investment Center (JIC) dalam Peningkatan Investasi (nomor 18)

Terdapat 5 rencana aksi utama dalam KSD ini yakni:

1. Pembentukan BLU Jakarta Investment Center
2. Aktivasi Komite Investasi
3. Penyusunan Peta Investasi Daerah
4. Pelaksanaan Jakarta Investment - Business Forum, JIC Talks, dan Partisipasi dalam Forum Bisnis Internasional
5. Revisi Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi (RUPMP) Provinsi DKI Jakarta

Seluruh output pada KSD tersebut tercapai 100 persen

h. Persentase Penyelesaian Rencana Aksi Program Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (nomor 20)

Target pada KSD ini yakni penerbitan ijin IUMK sebanyak 80.000 ijin dan capaiannya pada tahun 2021 terbit ijin IUMK sebanyak 120.592 ijin atau tercapai lebih dari 100 persen

i. Persentase Penyelesaian Rencana Aksi Pengembangan dan Pengelolaan Air Limbah dan Air Limbah Komunal (nomor 22)

Target KSD ini yakni fasilitasi terhadap Pelaksanaan proyek JSS Zona 8 sesuai tahapan SOP yang ada mulai dari tahapan penetapan SK Proyek,

penetapan tim KPDBU, pemberitahuan proyek kepada DPRD dan Bappenas hingga penyiapan dokumen OBC dan FBC. Seluruh tahapan KPDBU tersebut telah dilaksanakan dengan capaian 100 persen.

j. Persentase Penyelesaian Rencana Aksi Pengendalian Banjir melalui Naturalisasi Sungai, Pembangunan Waduk/ Situ/ Embung, Revitalisasi Sistem Polder dan Tanggul Pantai (nomor 23)

Target pada KASD ini Penerbitan Rekomendasi Teknis Dokumen Lingkungan Infrastruktur Pengendali Banjir Yang Di Biayai Oleh Pinjaman PEN pada :

1. Polder : Muara Angke, Betik-Artha Gading, Sunter Timur 1B, Teluk Gong, Polder Green Garden, Polder Kamal, Sub Polder Marunda (JGC – Metland System), Polder Pulomas, Polder Mangga Dua, Sistem Polder Kalideres – Cengkareng, Pompa Adhyaksa dan Tipala
2. Saluran : Sodetan Kali Ancol Jl. Lodan Kampung Walang, Pembangunan Saluran Drainase Kawasan Semanggi dan Atmajaya, Pembangunan Saluran Drainase Kawasan Balai Kartini, Penataan Kali Ciliwung Pasar Baru, Penataan Kali Besar

Seluruh permohonan perijinan tersebut telah diterbitkan kecuali penerbitan perijinan kali Ciliwung dan Kali Besar yang tidak ada pengajuannya

k. Persentase Penyelesaian Rencana Aksi Penciptaan Layanan Transportasi Terintegrasi melalui Jak Lingko (nomor 29)

Kegiatan Strategis Daerah Penyelesaian Rencana Aksi Penciptaan Layanan Transportasi Terintegrasi melalui Jak Lingko tercapai 100 persen yakni:

1. Perizinan Integrasi Halte Transjakarta dengan Stasiun KAI yakni terbitnya 40 perizinan revitalisasi Halte
2. Tersedianya Perizinan Pembangunan Penataan Kawasan Stasiun Tahap 2 (KRK, Izin Tebang Pohon dan SPPL)

l. Persentase Penyelesaian Rencana Aksi Pembangunan dan Pengoperasian Light Rail Transit (LRT) (nomor 31)

Kegiatan Strategis Daerah Persentase Penyelesaian Rencana Aksi Pembangunan dan Pengoperasian Light Rail Transit (LRT) (nomor 31) tercapai 100 persen dengan output sebagai berikut

1. Terbitnya Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan dan Izin Lingkungan Fase 2A dan 2B
2. Persetujuan rekomendasi teknis Andalalin Jalur dan Stasiun Fase 2A dan 2B
3. Fasilitasi penerbitan izin usaha prasarana LRT Jakarta melalui asistensi dengan PT. Jakarta Propertindo bersama dengan BKPM untuk mengajukan permohonan izin usaha prasarana perkeretaapian umum melalui OSS

m. Persentase Penyelesaian Rencana Aksi Pembangunan Fasilitas Park and Ride dan Optimalisasi Manajemen Perparkiran (nomor 35)

Target Kegiatan Strategis Daerah Pembangunan Fasilitas Park and Ride dan Optimalisasi Manajemen Perparkiran tercapai 100 persen yakni dengan terbitnya IMB parkir bertingkat oleh DPMPSTP

n. Persentase Penyelesaian Rencana Aksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Sepeda (nomor 36)

Terdapat 5 output KSD Pengembangan Sarana dan Prasarana Sepeda adapun 3 output tercapai 100 persen yakni:

1. Izin Membangun Prasarana (IMP) untuk Penyediaan Bike Lounge di BKB (April)
2. Izin Membangun Prasarana (IMP) untuk Penyediaan Bike Lounge di Taman Semanggi (Juni)
3. Izin Membangun Prasarana (IMP) untuk Penyediaan Bike Lounge di Sudirman (Bundaran Senayan)

Dan 2 output tercapai 95 persen yakni :

1. Penerbitan Izin Prinsip untuk penggunaan Dana KLB
2. Penetapan Trase Revitalisasi Jembatan Penyebrangan Orang dan Sepeda (Di depan Hotel Le Meridian, Sudirman)

Adapun output yang tidak tercapai dikarenakan pada saat penilaian periode KSD berjalan (B03/Triwulan 1) belum ada pengajuan trace oleh Dishub maupun Pengembang (Permadani Khatulistiwa)

o. Persentase Penyelesaian Rencana Aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA (nomor 39)

Adapun KSD Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA terdiri dari 3 rencana aksi dengan capaian 100 persen yakni:

1. Meningkatkan nilai pada komponen perencanaan kinerja dalam penerapan SAKIP pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan output:
 - Ditetapkannya Dokumen Kinerja (Eselon 2, 3, 4 dan Fungsional) Tahun 2021
 - Disusunnya Rancangan Indikator pada Dokumen Kinerja (Eselon 2, 3, 4, Fungsional dan Pelaksana) Tahun 2022
2. Meningkatkan nilai pada komponen pengukuran kinerja dalam penerapan SAKIP pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan output:
 - Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah TW IV Tahun 2020
 - Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah TW I Tahun 2021
 - Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah TW II Tahun 2021
 - Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah TW III Tahun 2021
 - Evaluasi capaian Dokumen Kinerja Eselon 2, 3, 4 dan Fungsional TW IV Tahun 2020
 - Evaluasi capaian Dokumen Kinerja Eselon 2, 3, 4 dan Fungsional TW I Tahun 2021
 - Evaluasi capaian Dokumen Kinerja Eselon 2, 3, 4 dan Fungsional TW II Tahun 2021
 - Evaluasi capaian Dokumen Kinerja Eselon 2, 3, 4 dan Fungsional TW III Tahun 2021
 - Evaluasi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2022
3. Meningkatkan nilai pada komponen pelaporan kinerja dalam penerapan SAKIP pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan output:
 - Tersusunnya LKIP Perangkat Daerah Tahun 2020
 - Terinputnya LKIP Perangkat Daerah Tahun 2020 pada aplikasi esr.menpan.go.id

p. Persentase Penyelesaian Rencana Aksi Perbaikan Tata Kelola Rumah Susun Sederhana Sewa dan Rumah Susun Milik (nomor 58)

Adapun KSD ini tercapai 100 persen dengan output ijin prinsip bentuk konversi kewajiban pembiayaan dan pembangunan rusun murah/ sederhana untuk Pembangunan Marketing Gallery dan peningkatan fasilitas rusun

q. Persentase Penyelesaian Rencana Aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan (nomor 61)

Terdiri dari 2 rencana aksi dengan capaian sebesar 100 persen yakni :

1. Rencana Aksi Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan output:
 - Kuisloner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Bulan Maret 2021
 - Data Calon Responden Internal dan Eksternal pada Bulan Maret 2021
 - Data Jumlah Penerima Layanan Pada Masing-Masing Pelayanan Pada Tahun 2021
 - Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap Triwulan
2. Rencana Aksi Progres penyelesaian tindak lanjut hasil Pengawasan APIP atas LHP yang terbit periode tahun 2019 s.d. 2021 dengan output TLHP APIP selesai ditindaklanjuti atas LHP yang terbit periode tahun 2019 s.d. 2021 sebanyak 85%.

r. Persentase Penyelesaian Rencana Aksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Masyarakat (nomor 45)

Terdapat 9 Rencana Aksi dengan capaian 100 persen sebanyak 8 rencana aksi yakni:

1. TLHP APIP selesai ditindaklanjuti atas LHP yang terbit periode tahun 2019 s.d. 2021. Target Capaian : 85%
2. terselesaikannya Ijin Prinsip bentuk konversi kewajiban pembiayaan dan pembangunan RSM/S untuk pembangunan Rumah Susun Kampung Akuarium Tahap II
3. Terselesaikannya Ijin Prinsip bentuk konversi kewajiban pembiayaan dan pembangunan RSM/S untuk pembangunan Rusun bagi warga eks Kampung Bukit Duri

4. terselesaikannya perizinan pembangunan Rumah Susun Kampung Kunir
5. Tersedianya Perizinan Pembangunan Rusun Jalan Tongkol
6. Terlaksananya proses Perizinan Pembangunan Rumah Susun Polsek Menteng
7. Terlaksananya proses Perizinan Pembangunan Rumah Susun yang baru Terbangun
8. Tersedianya Persetujuan Prinsip bentuk konversi kewajiban pembiayaan dan pembangunan RSM/S untuk pembangunan Rusun bagi warga Eks Kampung Kunir

Sedangkan satu rencana aksi outputnya hanya tercapai sebesar 97 persen dikarenakan saat periode penilaian Kegiatan Strategis daerah belum diselesaikannya GPA (Gambar Perencanaan Arsitektur) terhadap pembangunan Rusun Bukit Duri dikarenakan belum ada pengajuan dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- s. **Persentase Penyelesaian Rencana Aksi Pengelolaan Kawasan Pesisir Teluk Jakarta melalui Penyusunan Rencana Kebijakan dan Agenda Rehabilitasi Ekosistem Pesisir Jakarta Termasuk Audit Lingkungan Pulau Reklamasi (nomor 53)**
Adapun capaian dari KSD ini tercapai 100 persen meskipun outputnya tidak tercapai yakni dikarenakan terdapat perubahan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang no 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- t. **Persentase Penyelesaian Rencana Aksi Pengendalian Pencemaran Udara (nomor 71)**
Adapun KSD ini tercapai 100 persen dengan output terbitnya izin penyelenggaraan uji emisi sesuai dengan Keputusan Sekretaris Daerah No. 42 tahun 2020 tentang Tim Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor
- u. **Persentase Penyelesaian Rencana Aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) (nomor 63)**
Adapun output dari Kegiatan Strategis Daerah Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) adalah tersampainya data hasil kuisioner dan evaluasi SPBE Perangkat Daerah sesuai format KemenPAN RB dan DKI Jakarta dan tercapai 100 persen

v. Persentase Penyelesaian Rencana Aksi Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim (nomor 72)

Kegiatan Strategis Daerah Aksi Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim (nomor 72) terdiri dari 2 rencana aksi yang tercapai 100 persen yakni:

1. Penetapan Revisi Pergub Bangunan Gedung Hijau
2. Penyusunan dan Penerapan mekanisme insentif terkait implementasi prinsip bangunan gedung hijau

w. Persentase Penyelesaian Rencana Aksi Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian (nomor 73)

Adapun target KSD ini tercapai 100 persen dengan output terbitnya Ijin penebangan pohon untuk lokasi pembangunan sarana trotoar di kelurahan Selong, Petogogan, Melawai, Rawa Barat dan Senayan.

x. Persentase penyelesaian izin

Adapun target penyelesaian izin tepat waktu yang menjadi target rencana kinerja sebanyak 9 jenis izin berdasarkan Pergub 118 Tahun 2020 tentang Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang, adalah sebagai berikut:

1. Izin lokasi tepat waktu
Dengan Rumus perhitungan Jumlah penyelesaian izin lokasi tepat waktu (5 hari)/Total keseluruhan permohonan izin lokasi * 100%
2. Informasi Rencana Kota (IRK)
Dengan Rumus perhitungan Jumlah penyelesaian Informasi rencana kota (IRK) tepat waktu (14 hari)/Total keseluruhan permohonan Informasi rencana kota (IRK) * 100%
3. Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR)
Dengan Rumus perhitungan Jumlah penyelesaian Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR) tepat waktu (22 hari)/Total keseluruhan permohonan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR) * 100%
4. Gambar Perencanaan Arsitektur (GPA)
Dengan Rumus perhitungan Jumlah penyelesaian Gambar Perencanaan Arsitektur (GPA) tepat waktu (20 hari)/Total keseluruhan permohonan Gambar Perencanaan Arsitektur (GPA) * 100%
5. TABG (Tim Ahli Bangunan Gedung)

Dengan Rumus perhitungan Jumlah penyelesaian TABG (Tim Ahli Bangunan Gedung) tepat waktu/Total keseluruhan permohonan TABG (Tim Ahli Bangunan Gedung) * 100%

6. Izin Dewatering

Dengan Rumus perhitungan Jumlah penyelesaian Izin Dewatering tepat waktu (7 hari kerja)/Total keseluruhan permohonan Izin Dewatering * 100%

7. Analisa Dampak Lingkungan (Amdal)

Dengan Rumus perhitungan Jumlah penyelesaian Analisa Dampak Lingkungan (Amdal) (2 hari)/Total keseluruhan permohonan Analisa Dampak Lingkungan (Amdal) * 100%

8. Analisa Dampak Lalu Lintas (Andalalin)

Dengan Rumus perhitungan Jumlah penyelesaian Analisa Dampak Lalu Lintas (Andalalin) (2 hari)/Total keseluruhan permohonan Analisa Dampak Lalu Lintas (Andalalin) * 100%

9. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Dengan Rumus perhitungan Jumlah penyelesaian Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Total keseluruhan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) * 100%

Seluruh target perizinan tersebut diatas terselesaikan seluruhnya secara tepat waktu atau tercapai 100 %. Adapun kendala yang dihadapi pada saat pemrosesan izin antara lain sebagai berikut :

- lamanya pemohon memenuhi kekurangan berkas/dokumen
- luas lahan pengukuran diatas 10.000 m²
- faktor cuaca dan kondisi lapangan yang membutuhkan waktu survey lebih lama
- permohonan penjadwalan ulang waktu survey dari pemohon
- rekomendasi teknis dari SKPD yang memerlukan waktu lama
- pemohon/kuasa pemohon tidak memahami dokumen permohonan izin
- diperlukan klarifikasi/konfirmasi dengan SKPD teknis terkait

Berdasarkan Pergub 118 Tahun 2020 tentang Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang dapat dilaporkan hal-hal sebagai berikut :

- Penandatanganan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR) dan Izin Lokasi merupakan kewenangan Gubernur bukan lagi Kepala DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta
- IPPR yang sudah diterbitkan dan ditandatangani Kepala DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta merupakan IPPR yang masih menggunakan mekanisme pergub 209 tahun 2016 tentang Perizinan dan Rekomendasi Pemanfaatan Ruang dikarenakan pengajuan IPPR tersebut sebelum berlakunya Pergub 118 Tahun 2020.

y. Persentase pemberian izin usaha untuk peserta Jakpreneur

Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) dilakukan secara online melalui jakevo.jakarta.go.id dan layanan jemput bola dalam rangka pemberian relaksasi IUMK selama masa pandemi Covid-19. IUMK yang diterbitkan Triwulan IV Tahun 2021 sebanyak 10.359 (sepuluh ribu tiga ratus lima puluh sembilan) izin, sehingga total IUMK yang telah diterbitkan pada Tahun 2020 dan (Triwulan I, II, III dan IV) Tahun 2021 sebanyak 261.699 (dua ratus enam puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh sembilan) izin. Jumlah izin tersebut diantaranya merupakan pelaku UKM binaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah mendapatkan rekomendasi dan pelaku UKM bukan binaan. Pelaku UKM binaan oleh OPD Pendamping yang telah diberikan rekomendasi dan izin diantaranya telah terdaftar sebagai anggota Jakpreneur yang didaftarkan oleh OPD pendamping atau oleh pelaku UKM sendiri.

z. Persentase Pemanfaatan E-Order

Rumus perhitungan persentase pemanfaatan E-Order adalah Jumlah rupiah realisasi Belanja Makanan dan Minuman yang memanfaatkan e-order per triwulan dibagi Jumlah anggaran Belanja Makanan dan Minuman x 100%. Pada tahun 2021 jumlah alokasi belanja makan minum yang terbit SPD nya sebanyak Rp. 57.028.000 sedangkan jumlah belanja makan-minum pada tahun 2021 adalah sebanyak Rp 25.311.800, seluruh belanja makan-minum telah dilakukan melalui aplikasi e-order sehingga capaian pemanfaatan E-order DPMPTSP sebesar 100 %

aa. Opini laporan keuangan daerah

Pernyataan profesional badan pemeriksa keuangan RI mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah pemprov DKI Jakarta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, keandalan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap perundangan dan kecukupan pengungkapan (konversi nilai opini pemeriksaan LK, WTP=3(100%), WDP=2(75%), TW=1(50%), TMP=0(25%). Dan berdasar Laporan BPK Nomor 17.B/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.02/05/2021 tanggal 28 Mei 2021 yang didalamnya memuat opini BPK bahwa laporan keuangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta disajikan secara wajar tanpa pengecualian (WTP).

bb.Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Capaian indikator ini sebesar 100 persen dengan kriteria indikator:

1. Persentase tersusunnya strategi komunikasi program unggulan atau program umum Perangkat Daerah.
2. Persentase tersusunnya editorial plan program unggulan atau program umum Perangkat Daerah. Diskominfo menyusun editorial plan di level Provinsi.
3. Persentase tersusunnya daftar potensi krisis dan implementasi protokol krisis oleh Perangkat Daerah sesuai SOP yang disusun Diskominfo.
4. Persentase terpublikasinya materi komunikasi program unggulan dan program umum Perangkat Daerah melalui media massa atau media sosial atau media luar ruang.

Perhitungan dari masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Bobot 30% : PD menyusun paparan strategi komunikasi program unggulan atau program umum per triwulan.
2. Bobot 20% : PD menyusun paparan editorial plan program unggulan atau program umum per triwulan.
3. Bobot 20% : PD menyusun paparan list potensi krisis dan implementasi protokol krisis program umum atau program unggulan per triwulan.

4. Bobot 30% : PD mempublikasikan materi program unggulan dan program umum melalui media massa atau media sosial atau media luar ruang per triwulan (realisasi editorial plan, min 15 materi per triwulan).

cc. Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2021

Berdasar penilaian Tim Inspektorat terhadap implementasi SAKIP DPMPTSP dalam rangka peningkatan predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi PEmerintah sesuai surat tugas Nomor 84/1.921/KH.1/7.2021 perihal pelaksanaan evaluasi atas Implementasi SAKIP tahun 2021 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta tanggal 2 Agustus hingga 30 September 2021 diperoleh hasil sebagai berikut:

- Pada tanggal 17 September 2021 DPMPTSP mendapat skor "BB" dengan skor 78,09
- Pada tanggal 25 September 2021 DPMPTSP mendapat skor "A" dengan skor 84,73
- Pada tanggal 27 September 2021 DPMPTSP mendapat skor "A" dengan skor 86,86

dd. Nilai PMPRB

Tindak lanjut atas Laporan pelaksanaan PMPRB yang menjadi ruang lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta, adalah sebagai berikut :

1. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi (Biro ORB) Setda Provinsi DKI Jakarta sebagai penanggung jawab Reformasi Birokrasi di Provinsi DKI Jakarta pada Bulan Oktober 2021 mengganti keikutsertaan DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta pada PMPRB menjadi Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI WBK WBBM) Tahun 2021 berdasarkan usulan Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas Tahun 2021;
2. Sebagaimana dengan angka 1 (satu), DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta tidak lagi melanjutkan pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) PMPRB, dan diganti dengan melakukan pengisian LKE ZI WBK WBBM, membuat materi, penguatan regulasi dan persiapan

lainnya untuk penilaian ZI WBK WBBM di Lingkungan DPMPSTSP Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan arahan Biro ORB Setda Provinsi DKI Jakarta.

Terkait hal tersebut diatas capaian DPMPSTSP perihal nilai PMPRB disetarakan dengan tercapai 100 %

ee. Persentase terselesaikannya penerbitan rekomendasi teknis dokumen lingkungan infrastruktur pengendalian banjir yang dibiayai oleh Pinjaman PEN

Dengan capaian target penerbitan rekomendasi teknis dokumen lingkungan infrastruktur pengendalian banjir yang di biayai oleh pinjaman PEN tercapai 100 persen dengan rincian:

1. Polder : Muara Angke, Betik-Artha Gading, Sunter Timur 1B, Teluk Gong, Polder Green Garden, Polder Kamal, Sub Polder Marunda (JGC – Metland System), Polder Pulomas, Polder Mangga Dua, Sistem Polder Kalideres – Cengkareng, Pompa Adhyaksa dan Tipala
2. Saluran : Sodetan Kali Ancol Jl. Lodan Kampung Walang, Pembangunan Saluran Drainase Kawasan Semanggi dan Atmajaya, Pembangunan Saluran Drainase Kawasan Balai Kartini, Penataan Kali Ciliwung Pasar Baru, Penataan Kali Besar

Seluruh permohonan perijinan tersebut telah diterbitkan kecuali penerbitan perijinan kali Ciliwung dan Kali Besar yang tidak ada pengajuannya

ff. Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur

Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) dibagi Jumlah TL Arahan Gubernur dikali 100%, dan pada tahun 2021 jumlah Tindak Lanjut arahan Gubernur sebagaimana yang tercatat dalam sistem <https://etpp.jakarta.go.id/> sejumlah 7 daftar keputusan dan telah ditindaklanjuti seluruhnya sehingga capaian DPMPSTSP sebesar 100%.

gg. Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat

Adapun daftar pengaduan masyarakat merupakan yang tercatat dalam sistem CRM (Cepat Respon Masyarakat) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan terintegrasi dalam sistem <https://etpp.jakarta.go.id/> kepala DPMPSTSP

dengan jumlah daftar aduan diterima sebanyak 608 aduan dan jumlah aduan selesai sebanyak 608 aduan atau tercapai 100 %.

hh. Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)

Jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya dibagi jumlah seluruh rekomendasi LHP BPK RI yang diterima tahun 2005 dan seterusnya dikali 100% (Verifikasi oleh Inspektorat) adapun capaian DPMPTSP sebesar 100 %.

2. REALISASI KINERJA TAHUN 2021 DIBANDINGKAN CAPAIAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA

Jumlah realisasi mengalami kenaikan dari tahun 2017 dari Rp.108,6 Triliun menjadi Rp.114,2 Triliun pada Tahun 2018 atau mengalami kenaikan sebesar 5,1% begitu pula pada tahun berikutnya terjadi kenaikan dalam jumlah realisasi investasi dari Rp 114,2 Triliun tahun 2018 menjadi Rp. 123,9 Triliun pada tahun 2019 atau mengalami kenaikan sebesar 8,5%. Namun pada tahun 2019 mengalami penurunan dari Rp. 123,9 Triliun menjadi Rp. 95% Triliun pada Tahun 2020 atau mengalami penurunan sebesar 23,3%. Sedangkan untuk tahun 2021 terjadi kenaikan dari 95% menjadi 98,59% atau mengalami kenaikan sebesar 3,7%. Untuk indikator tingkat kepuasan masyarakat pada tahun 2017 blm menggunakan ukuran indeks kepuasan masyarakat, Pada tahun selanjutnya indeks kepuasan masyarakat mengalami penurunan kinerja dari 85,55 pada tahun 2018 menjadi 83,03 pada tahun 2019 atau menurun sebesar 3%. Namun mengalami peningkatan pada tahun 2019 dari 83,03 menjadi 89,99 pada tahun 2020 atau naik sebesar 8,4%. Pada Tahun 2021 Indeks kepuasan masyarakat mengalami peningkatan dari 89,99 menjadi 90,09 atau mengalami kenaikan sebesar 0,1%. Sedangkan untuk indikator persentase layanan perizinan dan non perizinan secara online mengalami capaian yang sama 100% dan terus mengalami peningkatan dan perbaikan dari tahun ke tahun.

Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja DPMPSTSP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 Dengan Realisasi Tahun Sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2020		2021	
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan Investasi di Provinsi DKI Jakarta	Pertumbuhan Nilai Investasi	Belum menjadi target	Belum menjadi target	3,8	146,15%
2	Meningkatnya pertumbuhan investasi	Realisasi Nilai Investasi	95	86,4%	98,59	104,88%
3	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan perizinan dan non perizinan melalui penyenggaraan layanan perizinan dan non perizinan secara online	Indeks tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan PTSP	89,9	101,6%	90,09	100,10%
4	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	96,2	96,20%	89,88	98,77%
5	Terjaminnya Akses dan Layanan Pendidikan, Kesehatan dan peningkatan keberdayaan yang berkualitas bagi semua	Persentase Penyelesaian Rencana Aksi Penyediaan Jaminan Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas dan Integratif (nomor 12)	100	100,00%	100	100,00%
6	Meningkatnya pertumbuhan investasi	Persentase Penyelesaian Rencana Aksi Pelaksanaan Reform Perizinan untuk Percepatan Ease of Doing Business (EODB) (nomor 17)	97,25	97,25%	100	100,00%
7	Meningkatnya pertumbuhan investasi	Persentase Penyelesaian Rencana Aksi Optimalisasi Mall Pelayanan Publik melalui Peningkatan Peran Jakarta Investment Center (JIC) dalam Peningkatan Investasi (nomor 18)	99,58	99,58%	100	100,00%
8	Meningkatnya kewirausahaan baru	Persentase Penyelesaian Rencana Aksi Program Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (nomor 20)	100,00	100,00%	100	100,00%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2020		2021	
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
9	Meningkatnya akses sanitasi layak	Persentase Penyelesaian Rencana Aksi Pengembangan dan Pengelolaan Air Limbah dan Air Limbah Komunal (nomor 22)	90,00	90,00%	96	96,00%
10	Meningkatnya fungsi dan pengelolaan infrastruktur pengendalian banjir dan abrasi	Persentase Penyelesaian Rencana Aksi Pengendalian Banjir melalui Naturalisasi Sungai, Pembangunan Waduk/ Situ/ Embung, Revitalisasi Sistem Polder dan Tanggul Pantai (nomor 23)	100,00	100,00%	100	100,00%
11	Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga jakarta	Persentase Penyelesaian Rencana Aksi Penciptaan Layanan Transportasi Terintegrasi melalui Jak Lingko (nomor 29)	100,00	100,00%	100	100,00%
12	Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga jakarta	Persentase Penyelesaian Rencana Aksi Pembangunan dan Pengoperasian Light Rail Transit (LRT) (nomor 31)	100,00	100,00%	100	100,00%
13	Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga jakarta	Persentase Penyelesaian Rencana Aksi Pembangunan Fasilitas Park and Ride dan Optimalisasi Manajemen Perparkiran (nomor 35)	100,00	100,00%	100	100,00%
14	Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga jakarta	Persentase Penyelesaian Rencana Aksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Sepeda (nomor 36)	100,00	100,00%	98	98,00%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2020		2021	
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
15	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase Penyelesaian Rencana Aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA (nomor 39)	100,00	100,00%	100	100,00%
16	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase Penyelesaian Rencana Aksi Perbaikan Tata Kelola Rumah Susun Sederhana Sewa dan Rumah Susun Milik (nomor 58)	100,00	100,00%	100	100,00%
17	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase Penyelesaian Rencana Aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan (nomor 61)	94,63	94,63%	100	100,00%
18	Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya	Persentase Penyelesaian Rencana Aksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Masyarakat (nomor 45)	100,00	100,00%	99	99,00%
19	Terbangunnya kota yang berwawasan tata ruang dan lingkungan sebagai perwujudan kota yang berkelanjutan dan lestari	Persentase Penyelesaian Rencana Aksi Pengelolaan Kawasan Pesisir Teluk Jakarta melalui Penyusunan Rencana Kebijakan dan Agenda Rehabilitasi Ekosistem Pesisir Jakarta Termasuk Audit Lingkungan Pulau Reklamasi (nomor 53)	100,00	100,00%	100	100,00%
20	Terbangunnya kota yang berwawasan tata ruang dan lingkungan sebagai perwujudan kota yang berkelanjutan dan lestari	Persentase Penyelesaian Rencana Aksi Pengendalian Pencemaran Udara (nomor 71)	100,00	100,00%	100	100,00%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2020		2021	
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
21	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel serta berbasis teknologi informasi	Persentase Penyelesaian Rencana Aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) (nomor 63)	100,00	100,00%	100	100,00%
22	Terwujudnya Jakarta kota tangguh bencana	Persentase Penyelesaian Rencana Aksi Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim (nomor 72)	93,33	93,33%	100	100,00%
23	Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta	Persentase Penyelesaian Rencana Aksi Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian (nomor 73)	100,00	100,00%	100	100,00%
24	Terselesaikannya izin lokasi tepat waktu	Persentase penyelesaian izin lokasi tepat waktu	100,00	100,00%	100	100,00%
25	Terselesaikannya Informasi Rencana Kota (IRK)	Persentase penyelesaian Informasi Rencana Kota (IRK)	100,00	100,00%	100	100,00%
26	Terselesaikannya Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR))	Persentase penyelesaian Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR)	100,00	100,00%	100	100,00%
27	Terselesaikannya Gambar Perencanaan Arsitektur (GPA)	Persentase penyelesaian Gambar Perencanaan Arsitektur (GPA)	100,00	100,00%	100	100,00%
28	Terselesaikannya TABG (Tim Ahli Bangunan Gedung)	Persentase penyelesaian TABG (Tim Ahli Bangunan Gedung)	100,00	100,00%	100	100,00%
29	Terselesaikannya Izin Dewatering	Persentase penyelesaian izin Dewatering	100	100,00%	100	100,00%
30	Terselesaikannya Analisa Dampak Lingkungan (Amdal)	Persentase penyelesaian Analisa Dampak Lingkungan (Amdal)	100	100,00%	100	100,00%
31	Terselesaikannya Analisa Dampak Lalu Lintas (Andalalin)	Persentase penyelesaian Analisa Dampak Lalu Lintas (Andalalin)	100	100,00%	100	100,00%
32	Terselesaikannya Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Persentase penyelesaian Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	100	100,00%	100	100,00%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2020		2021	
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
33	Terselesainya izin usaha untuk peserta Jakpreneur	Persentase pemberian izin usaha untuk peserta Jakpreneur	100	100,00%	100	100,00%
34	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemanfaatan E-Order	30	100,00%	100	100,00%
35	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Opini laporan keuangan daerah	3	100,00%	3	100,00%
36	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	100	100,00%	100	100,00%
37	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2021	Belum menjadi target	Belum menjadi target	86,86	107,23%
38	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	Nilai PMPRB	Belum menjadi target	Belum menjadi target	92	100,00%
39	Suksesnya Penyerapan PEN 2021	Persentase terselesainya penerbitan rekomendasi teknis dokumen lingkungan infrastruktur pengendalian banjir yang dibiayai oleh Pinjaman PEN	Belum menjadi target	Belum menjadi target	100	100,00%
40	Terselesainya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	100	100,00%	100	100,00%
41	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	100	100,00%	100	100,00%
42	Terselesainya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	100	100,00%	100	100,00%
Rata-Rata Capaian Kinerja				98,92%		101,19%

Dari empat puluh dua indikator pada tahun 2021 terdapat tiga puluh delapan indikator yang sama dengan indikator dari tahun 2020. Dan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 rata rata capaian kinerja meningkat dari 98,92 % menjadi 101,19% atau meningkat sebesar 2,29 %. Adapun indikator yang mengalami peningkatan kinerja sebanyak 7 (tujuh) indikator yakni:

1. Realisasi Nilai Investasi
Meningkat dari 86,4 % pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 tercapai 104,88%
2. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran.
Pada tahun 2020 realisasi sebesar 96,2 % menjadi 98,77 % pada tahun 2021
3. Persentase Penyelesaian Rencana Aksi Pelaksanaan Reform Perizinan untuk Percepatan Ease of Doing Business (EODB) (nomor 17).
Capaian indikator ini pada tahun 2020 sebesar 97,5 % dan pada tahun 2021 tercapai 100 %.
4. Persentase Penyelesaian Rencana Aksi Optimalisasi Mall Pelayanan Publik melalui Peningkatan Peran Jakarta Investment Center (JIC) dalam Peningkatan Investasi (nomor 18)
Tahun 2020 indikator ini tercapai 99,58 % dan tahun 2021 tercapai 100 %
5. Persentase Penyelesaian Rencana Aksi Pengembangan dan Pengelolaan Air Limbah dan Air Limbah Komunal (nomor 22)
Indikator ini pada tahun 2020 tercapai 90 % dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 96 % pada tahun 2021
6. Persentase Penyelesaian Rencana Aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan (nomor 61)
Capaian indikator ini mengalami peningkatan dari 94,63 % menjadi 100 % pada tahun 2021
7. Persentase Penyelesaian Rencana Aksi Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim (nomor 72)
Pada tahun 2020 realisasi sebesar 93,33 % menjadi 100 % pada tahun 2021

Sedangkan berdasarkan table diatas terdapat tiga indikator yang capaian tahun 2020 nya lebih tinggi dibandingkan capaian indikator tahun 2021 yakni:

1. Indeks tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan PTSP
Pada tahun 2020 indikator ini tercapai 101,6% dan tahun 2021 tercapai 100,10 %
2. Persentase Penyelesaian Rencana Aksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Sepeda (nomor 36)
Tahun 2020 indikator ini tercapai 100 % sedangkan tahun 2021 tercapai 98 %
3. Persentase Penyelesaian Rencana Aksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Masyarakat (nomor 45)
Capaian indikator ini pada tahun 2020 sebesar 100 % sedangkan tahun 2021 tahun tercapai 99 %

3. REALISASI KINERJA DAN TARGET TAHUN 2021 DIBANDINGKAN DENGAN TARGET NASIONAL

Indikator kinerja jumlah realisasi investasi penanaman modal di Provinsi DKI Jakarta ditargetkan pada tahun 2021 dapat mencapai Rp 94 Triliun dan pada tahun 2021 telah tercapai Rp 98,59 Triliun atau sebesar 104,88%. Indikator jumlah realisasi investasi penanaman modal merupakan indikator kinerja DPMPSTSP yang berlaku nasional dan memiliki target yang berlaku nasional yang ditetapkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Target realisasi investasi dari tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:



Sumber : Paparan Bidang Penanaman Modal

Target realisasi investasi BKPM untuk DKI Jakarta meningkat dari tahun ke tahun namun secara rata-rata masih lebih rendah dari target realisasi investasi pada Renstra DPMPTSP. Untuk tahun 2021 target investasi BKPM adalah 103,8 Triliun jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 98,59 Triliun tercapai sebesar 94,98%. Berikut rincian realisasi investasi di setiap wilayah DKI Jakarta :



Sumber : Paparan Bidang Penanaman Modal

Bila dibandingkan dengan daerah lain seperti Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah, DKI Jakarta menduduki peringkat kedua realisasi investasi sepanjang Tahun 2021 dengan capaian Jawa Barat sebesar 136 Triliun, Jawa Timur sebesar 79,5 Triliun dan Jawa Tengah sebesar 52,7 Triliun.

4. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN, TANTANGAN DAN PENINGKATAN KINERJA

a. Jumlah realisasi investasi penanaman modal di provinsi DKI Jakarta

Jumlah realisasi investasi penanaman modal di provinsi DKI Jakarta menjadi indikator utama untuk menilai pertumbuhan investasi di provinsi DKI Jakarta. Capaian kinerja jumlah realisasi investasi pada tahun 2021 yakni sebesar Rp. 98,59 Triliun dari target sebesar 94 Triliun atau tercapai sebesar 104,88% dan masuk dalam kategori berhasil. Hal ini disebabkan membaiknya iklim penanaman modal di Provinsi DKI Jakarta sehingga memberikan kepercayaan investor untuk menanamkan modal di Jakarta. Perbaikan infrastruktur dan banyaknya program pemerintah di bidang pembangunan juga turut meningkatkan minat investor untuk berinvestasi di Jakarta. Dan jika dibandingkan dengan target tahunan maka capaian indikator ini telah tercapai 85%.

Faktor-faktor pendukung keberhasilan mencapai target kinerja organisasi adalah :

- Dukungan anggaran yang memadai dalam rangka pelaksanaan urusan Penanaman Modal dilindungi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang antara lain digunakan untuk harmonisasi peraturan, pelaksanaan promosi dan pengendalian penanaman modal.
- Dikembangkannya sistem yang memudahkan pemohon dalam mengajukan izin dan non izin secara online,
- Diselenggarakannya *Mal Pelayanan Publik* merupakan pelayanan terpadu dan terintegrasi antara pelayanan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam satu gedung pelayanan,
- Perbaikan dalam kebijakan *Ease Of Doing Business (EODB)* yang mempengaruhi investor dalam menginvestasikan dananya di Jakarta. Dalam rangka mendukung peningkatan peringkat EODB atau Kemudahan Berusaha di DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019, maka dikeluarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Nomor 25 Tahun 2018 tentang Peningkatan Pelayanan Publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam rangka

mendukung Peningkatan Peringkat Kemudahan Berusaha / Ease Of Doing Business (EODB) di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019, yang mana di dalamnya terdapat keputusan bahwa meniadakan Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) dalam persyaratan perizinan dan non perizinan di DPMPTSP DKI Jakarta dan selain itu untuk Penerbitan SIUP dan TDP dilakukan secara online dengan waktu penyelesaian 0,5 hari setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar.

- Dikembangkannya *Jakarta Investment Center* (JIC) untuk memberikan kemudahan kepada investor dalam mendapatkan segala informasi tentang investasi di Jakarta.
- Dilakukannya pengendalian pelaporan LKPM sehingga dapat diketahui besarnya investasi yang telah ditanamkan oleh para investor di DKI Jakarta.
- Ditingkatkannya UMKM dengan melakukan kemudahan melalui relaksasi pemberian IUMK.
- Dikembangkannya pengintegrasian Sistem JakEvo-AJIB untuk mengatasi perizinan yang tidak dapat dilakukan secara online 100% karena beberapa hal yang harus tetap dijalani secara manual.

Tantangan dalam mencapai target kinerja organisasi adalah :

- Adanya pandemi *COVID-19* yang belum berakhir.
- Harmonisasi peraturan pemerintah pusat dan daerah yang belum tercapai.
- Masyarakat dan pelaku usaha belum sepenuhnya menerima informasi perubahan kebijakan yang telah dilakukan Pemda DKI Jakarta terkait *ease of doing business* (EODB).
- Masih terbatasnya informasi proyek-proyek investasi yang akan dipromosikan.

Tindak lanjut tantangan :

- Melakukan pengkajian dan penelaahan atas adanya kebijakan yang baru agar dapat diimplementasikan.

- Menyederhanakan regulasi investasi dan atau penanaman modal serta melakukan sosialisasi regulasi terpadu antara pemerintah pusat dan daerah.
- Meningkatkan aktivitas promosi melalui Branding (awareness campaign, penguatan citra investasi DKI) dan Bussines Forum.
- Mengoptimalkan fungsi JIC dalam rangka memperoleh informasi terkait proyek-proyek investasi yang ada di Provinsi DKI Jakarta.
- Harmonisasi regulasi Pusat dan Daerah.
- Penyusunan kebijakan dan disinsentif.
- Pengembangan kebijakan iklim penanaman modal sebagai agenda pemulihan ekonomi.
- Optimalisasi pengawasan dan fasilitasi penanaman modal.
- *Self Awareness* terhadap kebijakan EODB.
- Optimalisasi promosi investasi mewujudkan Jakarta sebagai destinasi investasi.
- Fasilitasi KPBU sebagai salah satu agenda *Creative Financing*

b. Indeks Tingkat kepuasan masyarakat

Indeks tingkat kepuasan masyarakat merupakan salah satu indikator kinerja DPMPSTSP Provinsi DKI Jakarta karena merupakan elemen penting dalam proses evaluasi kinerja, dimana tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif berbasis dari kebutuhan masyarakat. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Indeks tingkat kepuasan masyarakat diukur dengan cara melakukan Survey Kepuasan Masyarakat. Survey Kepuasan Masyarakat dilakukan di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta pada pusat-pusat layanan baik dari tingkat Dinas, Kep. Seribu, Kotamadya, Kecamatan dan Kelurahan. Total unit layanan yang dievaluasi adalah sebanyak 310 layanan, yang terdiri dari 1 Dinas, 5 unit kota/ 1 Kab, 42 layanan kecamatan dan 261 unit kelurahan. Survey dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian wawancara langsung dengan masyarakat yang telah

mendapatkan layanan secara paripurna dengan menggunakan kuesioner terstruktur (*Structured Questionnaire*).

Untuk perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) digunakan pedoman yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 197 Tahun 2016 dan sekarang di sesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 14 Tahun 2017, dimana terdapat 9 pertanyaan yang diajukan kepada masyarakat, dengan unsur-unsur pelayanan yang ditanyakan meliputi:

1. Kemudahan Persyaratan Pelayanan,
2. Kemudahan Prosedur Pelayanan,
3. Ketepatan Waktu Penyelesaian,
4. Kesesuaian Biaya,
5. Kesesuaian Peraturan (Hasil Pelayanan dengan Ketentuan yang ditetapkan),
6. Kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan,
7. Sikap SETIA
8. Kualitas sarana dan prasarana dan
9. Kecukupan / keefektifan sarana informasi/pengaduan

Berdasarkan jawaban yang diterima dari responden tersebut kemudian dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata tertimbang pada masing-masing aspek layanan. Hasil perhitungan tersebut kemudian disesuaikan dengan Tabel Nilai persepsi, Nilai Interval SKM, Nilai Interval Konversi SKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan, sehingga bisa diketahui Mutu Pelayanan dan Kinerjanya.

Tabel 3.3 Nilai Persepsi, Nilai Interval SKM, Nilai Interval Konversi SKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan.

Nilai Persepsi	Nilai Interval SKM	Nilai Interval Konversi SKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,59	25 - 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 - 3,06	65,00 - 76,60	C	Kurang baik
3	3,06 - 3,53	76,61 - 88,30	B	Baik

Nilai Persepsi	Nilai Interval SKM	Nilai Interval Konversi SKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
4	3,53 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat baik

Sumber: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Untuk mengetahui gambaran hasil penelitian maka perlu dilakukan analisa hasil survei dengan mengelompokkan kedalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu tingkat Kota/Kabupaten, tingkat Kecamatan dan tingkat Kelurahan kemudian untuk Analisa data Provinsi, ditambahkan data Provinsi. Dengan demikian maka akan diketahui karakteristik masing-masing tingkatan, sehingga memudahkan para pengelola layanan mengetahui kekuatan dan kelemahan terhadap layanan yang diberikan kepada publik. Kemudian dari keempat tingkatan tersebut dihitung juga nilai IKM secara keseluruhan. Nilai IKM ini selanjutnya menjadi nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di Provinsi DKI.

Kemudian untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan DPMPSTP secara keseluruhan, maka dilakukan analisa *Top 2 Boxes*, yaitu menghitung jumlah responden yang menyatakan puas dan sangat puas pada pertanyaan "J: Secara keseluruhan, seberapa puas Anda dengan Layanan Terpadu Satu Pintu yang diberikan oleh DPMPSTP DKI?" Kemudian jumlah keduanya dibagi dengan jumlah responden secara total, sebagai berikut:

$$Top\ 2\ Boxes = \frac{\sum (Puas + Sangat\ Puas)}{Jumlah\ Responden}$$

Pembahasan hasil penelitian selanjutnya akan di kelompokkan dalam 4 (empat) bagian pembahasan, yaitu:

1. Tingkat Kotamadya,
2. Tingkat Kecamatan,
3. Tingkat Kelurahan,
4. Tingkat Provinsi dan
5. Secara Keseluruhan.

Capaian kinerja indeks kepuasan masyarakat pada tahun 2021 sebesar 90,09 dari target sebesar 90 atau tercapai sebesar 100% dan masuk dalam kategori sangat berhasil. Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya maka terdapat kenaikan sebesar 0,1% yakni dari 89,99 pada tahun 2020 menjadi 90,09 pada tahun 2021. Dan jika dibandingkan dengan target jangka menengah maka capaian indikator ini telah tercapai 102%.

Faktor-faktor pendukung keberhasilan mencapai target kinerja organisasi adalah :

- Dukungan anggaran yang memadai dalam rangka pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan.
- Biro ORB dan Kominfo memberikan dukungan penuh kepada DPMPTSP terkait pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).
- Sarana Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) sudah baik seperti kuesioner SKM sudah diintegrasikan dengan Sistem Jakevo, sehingga kuesioner secara otomatis muncul sebelum responden *mendownload* output perizinan/non perizinan.
- Adanya komitmen yang kuat dari jajaran pimpinan dan seluruh Sumber Daya Manusia DPMPTSP untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
- Tersedianya sarana prasarana kantor dan pendukung teknis yang memadai dalam pelaksanaan layanan perizinan dan non perizinan.
- DPMPTSP berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi terhadap kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan melalui harmonisasi peraturan dan penyederhanaan persyaratan pelayanan perizinan dan non perizinan.
- Keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai persyaratan, prosedur dan biaya dalam memperoleh pelayanan perizinan dan non perizinan yang dapat diakses melalui portal pelayanan.jakarta.go.id
- Diselenggarakannya Mal Pelayanan Publik sebagai one-stop service 328 perizinan dan pelayanan terpadu kerjasama pelayanan pemerintah pusat dan daerah.

- Tersedianya pelayanan Antar Jemput Izin Bermotor (AJIB), yaitu layanan antar jemput berkas izin bagi pemohon yang tidak mempunyai waktu untuk datang langsung mengurus izin ke loket, semua jenis perizinan dan non perizinan dapat dilakukan melalui AJIB dengan syarat pemohon harus sebagai pimpinan/karyawan perusahaan tersebut dan bukan pihak ketiga atau calo, selain itu dikembangkan pelayanan AJIB dengan Mobile Service Unit (MSU) sebanyak 3 unit yang dapat juga melayani perizinan dan non perizinan di lokasi tertentu. Jumlah jasa pengurusan melalui AJIB pada tahun 2021 secara keseluruhan 527.168 layanan.
- Tersedianya layanan Call Center DPMPTSP yang dapat diakses melalui sambungan telepon 021-1500164 untuk melayani informasi pengurusan layanan perizinan dan non perizinan, pengaduan masyarakat dan pemesanan layanan AJIB. Selama tahun 2021 Call Center DPMPTSP telah melayani sebanyak 90.465 layanan.
- Terobosan serta inovasi untuk kemudahan layanan perizinan dan non perizinan, antara lain :
 - a. Dalam rangka pengendalian dan pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan mendukung Ketetapan Rencana Aksi Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (KORSUPGAH) maka telah dilakukan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah atas permohonan perizinan dan/atau non perizinan dengan melakukan pengecekan pada basis data yang dimiliki Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) melalui integrasi data dengan sistem yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);
 - b. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian dan kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dilakukan secara elektronik perlu dilakukan pemantauan terhadap seluruh aspek yang berpotensi menjadi hambatan dalam teknis pelaksanaan untuk kemudian segera ditindaklanjuti. Sesuai dengan instruksi Kepala Dinas PMPTSP, bahwa sejak tanggal 18

Januari 2021, seluruh pelayanan perizinan dilakukan secara online dan dibantu juga oleh petugas AJIB. Sebagai upaya untuk menunjang pelaksanaan pelayanan perizinan online 100% ini dibuat Keputusan Kepala Dinas PMPTSP Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tim Pemantauan Pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan secara Elektronik DPMPTSP. Untuk memperbaiki sistem pelaporan bulanan dari masing-masing service point, maka telah dibuatkan sebuah sistem pada *website internalpelayanan.jakarta.go.id* yang mana dari masing-masing service point melakukan rekap pelaporan pada sistem tersebut paling lambat tanggal 5 setiap bulannya.

- c. Bahwa untuk mendorong kemudahan dalam berinvestasi, pemberdayaan dan perlindungan ekonomi warga masyarakat, serta menindaklanjuti program Percepatan dan Relaksaksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dalam Rangka Mendorong Aktivitas Perekonomian pada Masa Pandemi Covid-19 perlu dilakukan inovasi dan terobosan dalam pelayanan perizinan. Sejalan dengan perubahan paradigma perizinan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai solusi atas banyaknya jumlah bangunan rumah tinggal eksisting tidak memiliki izin, permohonan perizinan yang tertunda cukup lama penyelesaiannya, kesulitan warga untuk memenuhi persyaratan dan mengikuti proses perizinan terutama terkait Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Maka dari itu sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2013 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pasal 7 dimana penyelenggara PTSP wajib menyederhanakan pelayanan perizinan dan non perizinan, telah dikembangkan inovasi melalui aplikasi Jakevo yang menggunakan pendekatan baru dimana pemohon akan difasilitasi, didampingi, dan diberikan bantuan oleh petugas dari DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta sejak tahap pra-pemohonan. Sebagai upaya untuk mendukung hal tersebut maka ditetapkanlah Keputusan Kepala Dinas PMPTSP Nomor 12 Tahun

2021 tentang Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tinggal Eksisting Relaksasi.

- d. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu disusun Dokumen Rencana Kerja Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka dari itu berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas PMPTSP Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penetapan Dokumen Rencana Kerja Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Tahun 2021 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta.
- e. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum pada penyelenggaraan pelayanan perizinan di Bidang Pekerjaan Umum, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas PMPTSP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Standarisasi Perhitungan Nota Perhitungan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (NPR IMB).
- f. Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas PMPTSP Nomor 166 Tahun 2020 telah ditetapkan Izin Penyelenggaraan Tempat Uji Emisi, dalam rangka kemudahan dan percepatan pelayanan maka ketentuan sebagaimana pada keputusan tersebut perlu disempurnakan. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas PMPTSP Nomor 29 Tahun 2021 tentang Izin Penyelenggaraan Tempat Uji Emisi
- g. Terhitung sejak hari Rabu, 29 April 2021, Penyelenggaraan Pelayanan Gambar Pra Perancangan Arsitektur yang menjadi kewenangan tingkat Dinas dan Kota/Kabupaten Administrasi dilakukan secara online. Dalam hal ini telah terintegrasi dengan pelayanan Ketetapan Rencana Kota (KRK) dan Izin Mendirikan

Bangunan (IMB) yang mana telah ditetapkan dengan peraturan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kemudian diperlukan penyederhanaan pelayanan perizinan, non perizinan dan pelayanan administrasi pada DPMPTSP dan sesuai dengan Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1285 Tahun 2019 tentang Tim Evaluasi Perizinan Pemanfaatan Ruang, maka dikeluarkanlah Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Gambar Pra Perancangan Arsitektur di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov DKI Jakarta Percepatan penyampaian laporan output perizinan bidang kesehatan berbasis elektronik (Silabik) di UP PTSP Kecamatan Taman Sari. Sistem pelaporan kesehatan berbasis elektronik mempercepat Dinas Teknis terkait (Suku Dinas Kesehatan) untuk mendapatkan data perizinan bidang kesehatan yang diterbitkan oleh DPMPTSP sehingga memudahkan untuk melaksanakan kegiatan Pembinaan Pengawasan Pengendalian (BINWASDAL)

- h. Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan publik pada UP PMPTSP sebagai dukungan percepatan pencapaian kemudahan berusaha bagi masyarakat. Sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas PMPTSP DKI Jakarta Nomor 82 Tahun 2021 ditetapkan standardisasi sarana dan prasarana pelayanan serta sumber daya manusia pada service point pelayanan terpadu satu pintu sebagai implementasi sistem manajemen mutu dengan menyesuaikan perkembangan kebutuhan masyarakat selama pandemi COVID-19
- i. Sehubungan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya serta telah berjalannya mekanisme pelayanan perizinan berusaha melalui Sistem OSS Berbasis Risiko, maka ditetapkanlah Instruksi Kepala Dinas PMPTSP DKI Jakarta Nomor 131 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Layanan Perizinan Dan Non Perizinan di

Lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pasca Implementasi Sistem OSS Berbasis Risiko

- j. Dalam rangka mendorong aktivitas perekonomian dan pembangunan di wilayah Provinsi DKI Jakarta akibat wabah *Covid-19* maka dilakukan Percepatan dan Relaksasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dengan sikap responsif, proaktif dengan tetap mempertimbangkan aspek kesehatan, keamanan dan keselamatan.
- k. Penyelenggaraan Pelayanan Izin Penggunaan Tanah Makam secara elektronik melalui web jakevo.jakarta.go.id dalam rangka efektivitas pelayanan Izin Penggunaan Tanah Makam.
- l. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian dan keserasian pola ruang area perencanaan dengan rencana kota disekitarnya pada perumahan, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Nomor 139 Tahun 2021 tentang Pelayanan Konsultasi Rencana Pola Perpetakan pada Perumahan yakni kegiatan hunian berupa rumah sangat kecil, rumah kecil, rumah sedang, rumah besar, dan rumah flat.
- m. Percepatan pelayanan Izin Pembuangan Air Limbah dilaksanakan dengan menyederhanakan prosedur dan persyaratan.
- n. Dalam rangka mendorong aktivitas perekonomian pada masa pandemi *Covid-19* maka perlu dilakukan Pelaksanaan Relaksasi Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK).
- o. Dalam rangka penertiban dan pencegahan penyebaran Coronavirus Disease 2019 (*Covid-19*), Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) serta Penanganannya yang sesuai Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2021 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian Keluar dan/atau Masuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dan juga memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan Gugus Tugas Percepatan

Penanganan terhadap keterpaparan virus COVID-19 di DKI Jakarta dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengeluarkan Surat Keputusan tentang Tata Cara Penerbitan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 yang dapat diakses secara elektronik melalui website corona.jakarta.go.id dan berlaku sejak tanggal 15 Mei 2021.

- p. Dalam rangka mendukung ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan untuk menanggulangi dampak status tanggap darurat bencana wabah *Covid-19* di Provinsi DKI Jakarta maka dilakukan Perpanjangan Masa Berlaku Dokumen Izin Tertentu di Bidang Kesehatan terkait penyebaran *Covid-19*.
- q. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing dalam mendukung perekonomian nasional dan perluasan kesempatan kerja dalam peningkatan investasi, maka perlu adanya pengaturan kembali perizinan penggunaan tenaga kerja asing dengan memperhatikan kondisi pasar kerja dalam negeri. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Pasal 23 bahwa Pemberi Kerja TKA wajib membayar DKPTKA (Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing) atas TKA yang dipekerjakan berupa retribusi daerah untuk Pengesahan RPTKA Perpanjangan di Provinsi DKI Jakarta. Sebagai upaya untuk mendukung hal tersebut maka ditetapkanlah Keputusan Kepala Dinas PMPTSP Nomor 17 Tahun 2021 tentang Validasi Pembayaran Notifikasi Perpanjangan Tenaga Kerja Asing.
- r. Pembuatan kanal Sistem Informasi Kotak Aspirasi (SIKOPI) pada web internalpelayanan.jakarta.go.id sebagai sarana komunikasi pengumpulan fakta-fakta lapangan yang diharapkan dapat mendekatkan kesenjangan antara kondisi yang diharapkan dan implementasi pelaksanaan layanan tersebut di lapangan. Selain itu, melalui hal tersebut diharapkan juga agar ditemukannya permasalahan-pemmasalahan baru yang tersembunyi dari perspektif manajemen atau pejabat yang berwenang, sehingga

dapat menghasilkan capaian yang maksimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat berdasarkan *evidence based*.

Tantangan dalam mencapai target kinerja organisasi adalah :

- Adanya pandemi *Covid-19* yang belum berakhir.
- Adanya perubahan peraturan, kebijakan dan SOP layanan perizinan dan non perizinan dari pemerintah pusat yang membutuhkan waktu penyesuaian.
- Masih adanya anggapan bahwa layanan perizinan dan non perizinan sulit dan rumit.
- Masih terdapat rekomendasi dari SKPD teknis terhadap perizinan dan non perizinan yang melebihi batas waktu
- Kebutuhan SDM Teknis masih ada kekurangan.

Tindak lanjut tantangan :

- Sosialisasi peraturan, kebijakan dan SOP terkait diagendakan secara terjadwal serta melibatkan stakeholder terkait.
- Pembuatan program untuk memberikan informasi, pengarahan, dan penyajian fakta berbasis data bahwa DPMPTSP merupakan tempat pengurusan izin cepat, mudah, terjangkau, tidak ada pungli.
- Perlu dikembangkan aplikasi pemberian rekomendasi secara online (e-rekomtek)
- Dilakukan perekrutan Tenaga Ahli bidang teknis yang memenuhi standar.

c. Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan secara online

Layanan perizinan dan non perizinan online dikembangkan untuk memastikan masyarakat memperoleh jaminan pelayanan sesuai dengan SOP, yakni jaminan prosedur, syarat, waktu dan biaya. Selain itu dengan adanya layanan online diharapkan mampu mengurangi jumlah calo yang merugikan pemohon.

Capaian persentase layanan perizinan dan non perizinan secara online tahun 2021 adalah 100%. Jika dibandingkan dengan target tahun 2021 maupun target jangka menengah maka indikator ini telah tercapai 100%.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tercapainya indikator ini adalah:

- Dukungan anggaran yang memadai dalam rangka pelaksanaan pengembangan layanan perizinan dan non perizinan secara online.
- Adanya komitmen yang kuat dari jajaran pimpinan dan seluruh SDM DPMPTSP untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
- Dukungan dari SKPD teknis terkait yakni Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Prov. DKI Jakarta dalam rangka pengembangan sistem *online* berupa pemberian rekomendasi.
- Tersedianya SOP yang lengkap terkait perizinan dan non perizinan sebagai dasar pembuatan bisnis proses pengembangan sistem *online*.

Tantangan pencapaian indikator

- Perubahan peraturan, kebijakan dan SOP layanan perizinan dan non perizinan menjadi tantangan tersendiri bagi DPMPTSP untuk terus mengembangkan sistem online layanan perizinan dan perizinan yang lebih cepat dan akomodatif terhadap kebutuhan pemohon.

Tindakanjantantangan

- Bidang pengembangan serta Bidang Penanaman Modal akan memberikan updating informasi mengenai perubahan SOP sehingga dapat langsung diakomodir dalam sistem online.

d. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dilakukan dengan mengukur 3 Komponen yaitu:

1. Penyerapan Anggaran. Komponen ini mengukur kesesuaian realisasi anggaran dibandingkan dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan di lingkungan Perangkat Daerah. Nilai penyerapan anggaran maksimal adalah 40%. Penyerapan

anggaran bernilai 40% apabila serapan anggaran $\geq 80\%$. Apabila serapan anggaran di bawah $< 80\%$ maka perhitungan nilai penyerapan anggaran = (Persentase Serapan Anggaran x 40%). Anggaran yang diperhitungkan meliputi APBD dan BLU, dan tidak termasuk dana transfer dari pemerintah pusat.

2. Efisiensi adalah sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dari subkegiatan yang target sasarannya telah dicapai. Apabila pencapaian output tidak tercapai 100% maka unsur efisiensi tidak diukur. Sisa dana adalah selisih lebih pagu anggaran dengan realisasi anggaran dimana selisih lebih pagu dimaksud sudah tidak dialihkan kembali untuk subkegiatan/belanja lainnya.
3. Pencapaian output adalah persentase capaian indikator kinerja subkegiatan (output). Realisasi pencapaian output dapat dilihat dalam aplikasi e-monev Anggaran hasil inputan PD/UKPD

Metode Pengukuran:

Formulasi pengukuran adalah sebagai berikut:

1. Serapan Anggaran $\geq 80\%$ dan output 100%

Realisasi = (40%) + ((%efisiensi X 10%)/20%) + (50%)

2. Serapan Anggaran $< 80\%$ dan output $< 100\%$

Realisasi = (Penyerapan Anggaran X 40%) + (pencapaian output X 50%)

3. Serapan Anggaran $\geq 80\%$, namun output $< 100\%$

Realisasi = (40%) + (pencapaian output x 50%)

Realisasi indikator ini sebesar 89,88 persen atau tercapai 98,77 % dan masuk dalam kelompok predikat sangat berhasil.

5. ANALISIS ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA

a. Pemanfaatan Sumber Daya Manusia

Jumlah PNS pada DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta terhitung sampai dengan 31 Desember 2021 berjumlah 1.242 pegawai dan jumlah pegawai non PNS sebanyak 1.345 sehingga jumlah total pegawai DPMPTSP sebanyak 2.587 pegawai, sedangkan menurut analisa beban kerja kebutuhan pegawai dibutuhkan PNS sebanyak 3.047 pegawai menurut Analisa jabatan(Anjab) atau Analisa Beban Kerja (ABK).

Tabel 3.4 Perbandingan Jumlah Pegawai dengan Capaian Kinerja

Jumlah Pegawai	Jumlah Anjab/ABK	Persen	Capaian Kinerja
2.587	3.047	84,9 %	100%

Melihat tabel tersebut diatas bahwa meskipun jumlah pegawai masih lebih kecil dari kebutuhan ANJAB/ABK yakni sebesar 84,9%, namun capaian kinerja secara keseluruhan rata-rata tercapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa DPMPTSP dapat mengoptimalkan sumber daya manusia di Lingkungan DPMPTSP.

Berdasarkan analisis sumber daya diatas, terutama dari segi sumber daya manusianya, maka dapat disimpulkan bahwa kebutuhan SDM masih diperlukan untuk mendorong optimalisasi target kinerja. Dan kebutuhan tenaga PJLP sebagai pendukung capaian kinerja DPMPTSP sangat dibutuhkan.

b. Analisa Sumber Daya Anggaran

Target belanja DPMPTSP pada tahun Rp.684.584.394.547 dan realisasi sebesar Rp. 656.181.882.571 atau sebesar 95,85 %. DPMPTSP pada tahun 2021 mengalami refocusing anggaran sebagai berikut :

Tabel 3.5 Tabel Rincian Refocusing Anggaran Tahun 2021

No	Sub Kegiatan	Penetapan APBD (PERDA 4TAHUN 2021)	APBD-P Tahun 2021	Refocusing
----	--------------	------------------------------------	-------------------	------------

1	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	759.650.932	305.350.000	454.300.932
2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	1.389.800.000	345.000.000	1.044.800.000
3	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	602.106.240	282.714.060	319.392.180
4	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	2.891.813.655	693.407.880	1.998.405.775
5	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	17.888.567.984	11.275.553.027	6.613.014.957
6	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	38.863.295.908	34.795.213.568	4.068.082.340
7	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	57.468.783.377	56.703.338.939	765.444.438

8	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	10.533.835.966	9.718.030.340	815.805.626
9	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	1.417.591.365	1.360.431.365	57.160.000
10	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	1.074.607.041	883.470.180	191.136.861
11	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	9.327.595.747	9.234.573.400	93.022.347
12	Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta	922.163.820	921.450.000	713.820
13	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	775.582.360	669.000.000	106.582.360
14	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	580.778.140.445	540.470.755.249	40.307.385.196
15	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	13.227.500	4.571.380	8.656.120

16	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.873.282.480	974.333.819	3.898.948.661
17	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.028.391.948	95.419.060	1.932.972.888
18	Penyediaan Bahan/Material	255.240.760	255.240.760	0
19	Fasilitasi Kunjungan Tamu	550.408.156	71.279.571	479.128.585
20	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.232.296.210	3.232.296.210	0
21	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.232.710.264	2.305.840.200	926.870.064
22	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.322.619.200	1.610.848.800	711.770.400
23	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.003.507.360	3.961.524.474	41.982.886
24	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.256.460.745	1.434.527.671	821.933.074
25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.207.147.685	541.613.420	665.534.265
26	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	121.256.443	121.256.443	0

27	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.363.405.406	2.292.040.431	71.364.975
28	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.314.300	25.314.300	0
TOTAL		750.978.803.297	684.584.394.547	66.394.408.750

DPMPTSP mengalami refocusing Anggaran Tahun 2021 dari Rp.750.978.803.297 menjadi Rp.684.584.394.547 atau penurunan sebesar 88% dari Anggaran Penetapan APBD akibat adanya pandemi Covid-19 yang membuat terjadinya kontraksi APBD Provinsi DKI Jakarta. Namun adanya refocusing anggaran DPMPTSP masih menunjukkan performa kinerja yang baik karena komitmen pimpinan dan seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi dengan sebaik-baiknya.

Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran	%
Realisasi nilai investasi penanaman modal di Provinsi DKI Jakarta	104,88%	73,64%	142,4%
Indeks Kepuasan Masyarakat	100%	92,29%	108,3%
Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan secara online	100%	98,22%	101,8%

Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	98%	95,85%	102,2%
Rata-rata	100,72%	90%	111,9%

Dibandingkan dengan kinerja yang dicapai pada tahun 2021 realisasi anggaran sebesar 90% dibandingkan dengan realisasi kinerja sebesar 100,72% menunjukkan adanya efektifitas penggunaan dana.

Berdasarkan analisis sumber daya diatas, terutama dari segi penyerapan anggarannya, maka dapat disimpulkan bahwa tahun 2021 DPMPTSP masih membutuhkan tambahan alokasi anggaran yang tidak sedikit. Kebutuhan anggaran tersebut diperlukan untuk melakukan langkah-langkah dalam rangka mencapai target dalam Renstra DPMPTSP Tahun 2017-2022 dan untuk mewujudkan organisasi yang efektif dan efisien, akuntabel dan berkinerja tinggi, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas

6. ANALISIS PROGRAM YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENYAMPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Program yang menunjang pencapaian indikator kinerja DPMPTSP sebanyak 7 program dengan 13 kegiatan dan 28 Sub kegiatan. Adapun pencapaian dari setiap program tersebut adalah sebagai berikut:

a. Program Promosi Penanaman Modal

Untuk dapat melaksanakan program ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 976.121.940,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 461.250.000,- Hasil kegiatan dari program ini antara lain:

- Mengikuti *Indonesia-Japan Virtual Bussiness Forum (IJBF)* yang diselenggarakan oleh KBRI Tokyo bekerja sama dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Tokyo pada tanggal 19 Oktober 2021.

- Menyusun daftar proyek prioritas dalam rangka promosi proyek prioritas Provinsi DKI Jakarta dengan berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan BUMD Provinsi DKI Jakarta yaitu:

Tabel 3.7 Daftar Proyek Prioritas

No	Project	Pemilik Project
1	MRT Fase IV –Fatmawati –TMII	PT. MRT Jakarta
2	Retail Area Bundaran Hotel Indonesia	PT. MRT Jakarta
3	Retail Development Area :Fatmawati St	PT. MRT Jakarta
4	Transit Area Plaza Mahakam	PT. MRT Jakarta
5	Nuansa Cilangkap	Perumda Sarana Jaya
6	Nuansa Pondok Kelapa	Perumda Sarana Jaya
7	Electric Bus	PT. Transportasi Jakarta
8	LRT Fase 2A : Kelapa Gading -JIS	PT. Jakarta Propertindo
9	TOD Pegangsaan Dua	PT. Jakarta Propertindo
10	Intermediate Treatment Facility Bantargebang	Dinas Lingkungan Hidup
11	Refused Derived Fuel Plant Bantar Gebang	Dinas Lingkungan Hidup

- Penyusunan Investment Booklet Provinsi DKI Jakarta yang berisi proyek prioritas yang telah teridentifikasi sebagai media informasi dalam menyampaikan rincian dari setiap proyek prioritas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

- Melaksanakan promosi proyek prioritas Provinsi DKI Jakarta dengan menampilkan proyek prioritas di dalam web invest.jakarta.go.id dan media sosial.
- Menyelenggarakan pre-event kegiatan webinar dengan IIPC Singapore dengan tema " *InSight Investment Webinar Series : Investment Opportunities in Jakarta*" pada tanggal 13 Oktober 2021.
- Menyelenggarakan Jakarta Investment Forum (JIF) pada tanggal 11-12 November 2021.

b. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Untuk dapat melaksanakan program ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 650.350.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 561.470.000,- Hasil kegiatan dari program ini antara lain:

- Penyusunan analisis peningkatan EODB parameter Dealing With Construction Permit.
- Penyusunan analisis mekanisme penyusunan *Knowledge Management* Agen Investasi.
- Penyusunan analisis pemetaan insentif/disinsentif untuk pajak/retribusi daerah.
- Penyusunan analisis kinerja investasi PMA dan PMDN Provinsi DKI Jakarta berdasarkan penyerapan TKI
- Penyusunan Strategi Pengembangan Iklim Penanaman Modal metode Planning-Organizing-Actuating-Controlling (POAC).

c. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Untuk dapat melaksanakan program ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 883.470.180,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 662.080.000,- Hasil kegiatan dari program ini antara lain:

- Melaksanakan kegiatan pengawasan penanaman modal di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 61.180 kegiatan pengawasan.

- Membuat rancangan sistem pelaporan pengawasan secara online dimulai dengan UP PMPTSP wilayah selaku pelaksana pengawasan penanaman modal yang telah memiliki akun pada sistem tersebut melakukan proses log in kemudian UP PMPTSP wilayah akan ditampilkan data pelaku usaha di wilayahnya yang perlu dilakukan kegiatan pengawasan. Setelah melaksanakan kegiatan pengawasan, UP PMPTSP menginput data dan dokumentasi untuk divalidasi oleh Tim Bidang Penanaman Modal.
- Melaksanakan kegiatan sinkronisasi realisasi investasi melalui LKPM berupa bimbingan teknis pengisian LKPM yang diadakan sebanyak 2 (dua) kali dengan peserta para Kepala UP PMPTSP Kota Administrasi/Kabupaten, Kepala UP PMPTSP Kecamatan, Kepala UP PMPTSP Kelurahan dan petugas Antar Jemput Izin Bermotor (AJIB).
- Melaksanakan kegiatan Diseminasi Kebijakan Penanaman Modal yang diadakan sebanyak 1(satu) kali mengenai Peraturan Kepala BKPM No.5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan peserta Pusdatin DPMPTSP, Bidang Pengembangan, UP PMPTSP Tingkat Kota/Administrasi Kabupaten, UP PMPTSP Kecamatan dan UP PMPTSP Kelurahan.
- Direkrutnya tenaga ahli yaitu Tenaga Ahli Analisis Pengawasan Penanaman Modal dan Tenaga Ahli Pemantauan Penanaman Modal
- Melaksanakan kegiatan Pemantauan Penanaman Modal ke 12 lokasi proyek.
- Melaksanakan kegiatan pengawasan penanaman modal ke 302 lokasi proyek.
- Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis/sosialisasi kemudahan berusaha yang dilaksanakan sebanyak 2 kali dengan total peserta 360 pelaku usaha.
- Membuat rancangan sistem pelaporan pengawasan secara online dimulai dengan UP PMPTSP wilayah selaku pelaksana

pengawasan penanaman modal yang telah memiliki akun pada sistem tersebut melakukan proses log in kemudian UP PMPTSP wilayah akan ditampilkan data pelaku usaha di wilayahnya yang perlu dilakukan kegiatan pengawasan. Setelah melaksanakan kegiatan pengawasan, UP PMPTSP menginput data dan dokumentasi untuk divalidasi oleh Tim Bidang Penanaman Modal.

d. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Untuk dapat melaksanakan program ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 883.470.180,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 662.080.000,- Hasil kegiatan dari program ini antara lain:

- Melaksanakan fasilitasi berupa bimbingan dan konsultasi teknis dalam rangka investasi dan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha.
- Fasilitasi penanaman modal baru dilakukan pada 46 (Empat puluh enam) perusahaan dan 1 (satu) perusahaan termasuk fasilitasi penanaman modal lanjutan.
- Melaksanakan pendampingan terhadap proyek KPDBU yaitu:
 1. *Jakarta Sewarage System (JSS) Zona 8*
 2. *Light Rail Transit (LRT) Jakarta*
 3. *Rusunawa Daan Mogot KM 18*
 4. *SPAM Ir. H Djuanda /Jatiluhur II*
 5. *Pengelolaan Jasa Digital (Digital Service Management) Jakarta Smart City*
 6. *Intermediate Treatment Facility (ITF) DKI Jakarta*
- Melaksanakan evaluasi dan pengembangan regulasi, SOP dan Bisnis Proses KPDBU di DKI Jakarta.

e. Program Pelayanan Penanaman Modal

Untuk dapat melaksanakan program ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 113.852.567.239,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 111.982.298.930,- Hasil kegiatan dari program ini antara lain:

- Meraih Sertifikat ISO 9001:2015 pada Bidang Pelayanan I yaitu dalam Sistem Manajemen Mutu.
- Pelayanan perizinan dan non perizinan di DPMPSTSP pada tahun 2021 sebanyak 5.699.176 layanan, dengan rincian di tingkat provinsi sebanyak 12.863 (0,23%), Kota/Kab sebanyak 23.021 (0,4%) layanan, kecamatan sebanyak 271.404 (4,76%) layanan dan kelurahan sebanyak 5.391.888 (94,61%) layanan.
- Relaksasi pemberian Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)
- Telah diterbitkannya 123.076 izin usaha mikro dan kecil (IUMK)
- Direkrutnya 300 Customer Relation Officer (CRO) sebagai front office DPMPSTSP.
- Direkrutnya 200 pegawai Antar Jemput Ijin Bermotor (AJIB) yang melayani sebanyak 527.168 layanan.
- Direkrutnya 29 orang pegawai Call Center dan melayani sebanyak 90.465 layanan.
- Direkrutnya 117 orang Juru Ukur, 137 orang Penunjang Juru Ukur dan 96 orang Pengolah Data, 16 Arsitek Perizinan dan 14 Inspektur Bangunan.
- Bidang Penyuluhan dan Pengaduan pada Tahun 2021 memberikan pelayanan informasi masyarakat sebanyak 90.465 layanan, terdiri dari loket konsultasi/penyuluhan 4.377 layanan, melalui surat dan media sosial sebanyak 3.946 layanan, email sebanyak 2.412 layanan, Call Center sebanyak 90.465 layanan dan melalui kunjungan *best practice* (baik secara langsung maupun melalui bantuan teknologi informasi) diikuti 150 peserta.
- Perhitungan AVE (Advertising Value Equivalency) yaitu efektifitas pencapaian pelaksanaan fungsi kehumasan (Public Relation) yang diukur dengan memberi perkiraan nilai moneter sebuah kampanye public relation melalui interaksi media komunikasi baik offline maupun online dengan mengonversikan terpaan pesan komunikasi ke dalam nilai moneter pemasangan iklan. Berdasarkan perhitungan total AVE DPMPSTSP sepanjang tahun 2021 sebesar 19,5 Miliar.

- Pelaksanaan kegiatan komunikasi masyarakat terpadu dilakukan dengan daring imbas dari pandemi *Covid-19* sehingga kegiatan yang dilakukan melalui ruang publik ditiadakan sementara waktu. Namun, jumlah publikasi media televisi meningkat sebesar 27%. DPMPTSP diberitakan 1000 kali di berbagai media baik TV, Radio, media cetak maupun online, media sosial sebanyak 5.189.288 impression. Telah dilaksanakan kegiatan komunikasi masyarakat terpadu bekerjasama dengan Kementerian Kominfo melalui program Layanan Jakarta ON TV telah tayang sebanyak 23 episode setiap hari Selasa pukul 18.30 WIB dan siaran ulang pada pukul 07.00 WIB di channel GPRTV (C Band Satelit Telkom 4 Freq 3766 pMHz) atau melalui Live Streaming di website GPRTV.ID. Video yang diproduksi sebanyak 133 video motion grafis. Desain grafis yang diproduksi sebanyak 393 design. Panduan atau pedoman terkait pelaksanaan komunikasi masyarakat terpadu sebanyak 9 panduan/pedoman dengan topik diantaranya panduan SIKM, panduan penyelenggaraan event hybrid (seremonial virtual), petunjuk teknis untuk kelengkapan ISO 9001:2015, 2 Strategi komunikasi untuk program unggulan DPMPTSP di Tahun 2021, 2 protokol krisis, kalender komunikasi setiap triwulan, dan laporan pelaksanaannya setiap bulan sesuai Instruksi Sekretaris Daerah No.76 Tahun 2020 tentang Penyusunan Strategi Komunikasi Rencana Kinerja Daerah Provinsi DKI Jakarta. Media produksi melibatkan 41 publik figur yang menyatakan dukungan/testimoni mengenai pelayanan publik yang prima di Jakarta.
- Publikasi berita positif DPMPTSP dengan rasio berita positif sebesar 9,6.
- Kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat telah dilaksanakan dengan hasil indeks kepuasan masyarakat sebesar 90,09.
- Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi layanan dengan jumlah yang sudah di monev sebanyak 269 service point.
- Tersedianya sistem informasi pendukung layanan investasi serta perizinan dan non perizinan yakni Jakevo, Jakarta Virtual

Consultan for Bussines Prosses (JVC4b) dengan OSS (*Online Single Submission*), Jakarta Investment Center.

- Jumlah pelaksanaan sidang Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) sebanyak 24 kali.
- Bidang Aktivitas Usaha telah berhasil mendapatkan sertifikat The International Organization For Standardization (ISO).SNI ISO 9001: 2015

f. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Untuk dapat melaksanakan program ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 558.065.861.788,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 532.806.228.141,- Hasil kegiatan dari program ini antara lain:

- Beroperasinya sarana dan prasana kantor sesuai sasaran fungsionalnya.
- Tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana kantor pendukung layanan perizinan dan non perizinan antara lain alat tulis kantor, alat rumah tangga kantor, kelengkapan komputer seperti (flash disk, mouse, keyboard, hard disk, speaker dll) dan alat kerja lainnya untuk unit layanan di tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kota/Kabupaten dan Provinsi.

g. Program Pengelolaan Data dan Sistem informasi Penanaman Modal

Untuk dapat melaksanakan program ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 9.234.573.400,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 9.070.555.500,- Hasil kegiatan dari program ini antara lain:

- Integrasi Jakevo dengan Jaki sebagai sarana app
- Pengembangan sistem/aplikasi PM1 kewenangan Camat dan Lurah
- Penyusunan peta investasi daerah
- Digitalisasi rekomendasi teknis (rekomtek online) di Jakevo
- Penyelesaian assessment kuesioner SPBE

- Implementasi Surat Izin Keluar Masuk oleh Lurah pada saat pengendalian penduduk mudik 2021 dan STRP
- Melaksanakan integrasi data dan/atau sistem informasi baik dengan Kementerian/Lembaga/Organisasi Perangkat Daerah/Institusi sebagai berikut:

Tabel 3.8 Daftar Integrasi Data dan/atau Sistem Informasi

N o	Jenis Perizinan/No n Perizinan	K/L/OPD terkait	Pemanfaatan Integrasi	Aplikasi	Progress
1	SIUP OSS	BKPM OSS	Pengefektifan SIUP OSS	Jakevo- OSS	Terlaksana
2	Izin Uji Emisi	Dinas Lingkungan Hidup	Perbaharuan data bengkel uji emisi yang telah terregistrasi dan berizin	Jakevo-SI Uji Emisi	Terlaksana
3	SIP Dokter/Dokter Gigi	KKI (Konsil Kedokteran Indonesia)	Pemrosesan SIP Dokter/Dokter Gigi berdasarkan STR dari KKI oleh DPMPTSP	Jakevo- SI Registrasi KKI	Terlaksana
4	SIP Tenaga Kesehatan	Kementrian Kesehatan RI	Pemrosesan SIP tenaga kesehatan dengan master data faskes dari Kemenkes oleh DPMPTSP	Jakevo- SIDMK	Administrasi(Nota Kesepakatan Bersama)

5	Izin Penggunaan Tanah Makam & Izin Penebangan Pohon Pelindung	Dinas Pertamanan dan Kehutanan	Pemrosesan data pemakaman untuk IPTM oleh DPMPSTSP	Jakevo-SI pertamana n	Dilanjutkan Tahun 2022 terkendala belum ada kesepakatan terkait penggunaan data pemakaman
6	SIPA Bor, SIPA Pantek dan Izin Dewatering	Dinas SDA dan Bappenda	Pembaharuan data sipa dan dewatering untuk No Vak/No Reg oleh Dinas SDA Registrasi data pajak air tanah	Jakevo-SI DBAT-SI Pajak	Uji coba pihak DSDA
7	Perizinan/Non-Perizinan dengan SKRD/SSRD	Badan Pendapatan Daerah	Penggunaan eret pada aplikasi Jakevo untuk penetapan SKRD dan notifikasi pembayaran	Jakevo-eRetribusi	Tertaksana pada sistem <i>Jakevo Development</i>

- Melaksanakan survei kepuasan terhadap penggunaan perizinan dan non perizinan secara online dan kepuasan pengelolaan sarana prasarana teknologi informasi untuk peningkatan pelayanan publik dengan hasil tingkat kepuasan sebesar 86% atau sangat puas.

B. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun anggaran 2021 DPMPSTSP dialokasikan anggaran sebesar Rp.684.584.394.547,-. Anggaran tersebut terdiri atas Belanja Operasi (pegawai dan barang jasa) sebesar Rp. 682.043.394.547,- dengan penyerapan sebesar Rp. 653.732.732.571 atau 95,85% dan Belanja Modal sebesar Rp.2.541.000.000,- dengan penyerapan sebesar Rp.

2.449.150.000,- atau 96,39 %, yang dijabarkan ke dalam 7 Program dan 13 Kegiatan dan 28 Sub kegiatan. Dengan penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.9 Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2021

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
BELANJA OPERASI		540.470.755.249	516.276.771.829	95,52%
	Belanja Pegawai	540.470.755.249	516.276.771.829	95,52%
	Belanja Barang Jasa	141.572.639.298	137.455.960.742	97,09%
Program Promosi Penanaman Modal				
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	976.121.940	461.250.000	47,25%
1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	282.714.060	126.800.000	44,85%
2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	693.407.880	334.450.000	48,23%
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal				
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	305.350.000	256.470.000	83,99%
1	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	305.350.000	256.470.000	83,99%
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	345.000.000	305.000.000	88,40%

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
1	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	345.000.000	305.000.000	88,40%
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal				
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		883.470.180	662.080.000	74,94%
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	883.470.180	662.080.000	74,94%
Program Pelayanan Penanaman Modal				
Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota		11.275.553.027	10.975.218.641	97,33%
1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	11.275.553.027	10.975.218.641	97,33%
Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		102.577.014.212	101.007.080.289	87,96%
1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	34.795.213.568	34.525.896.425	99,22%
2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	56.703.338.939	55.907.044.880	98,59%
3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	9.718.030.340	9.465.083.984	97,39%
4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	1.360.431.365	1.109.055.000	81,52%
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal				

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	9.234.573.400	9.070.555.500	98,22%
1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	9.234.573.400	9.070.555.500	98,22%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi				
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	669.000.000	608.500.000	90,95%
1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	669.000.000	608.500.000	90,95%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	540.475.326.629	516.281.264.729	95,52%
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	540.470.755.249	516.276.771.829	95,52%
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4.571.380	4.492.900	98,28%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.396.273.210	1.190.609.230	85,27%
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	974.333.819	788.528.370	80,93%
2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	95.419.060	77.324.500	81,03%
3	Penyediaan Bahan/Material	255.240.760	255.240.760	100%
4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	71.279.571	69.515.600	97,52%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.110.509.684	10.559.747.985	95,04%
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.232.296.210	3.212.452.981	99,38%
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.305.840.200	1.829.424.455	79,33%

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.610.848.800	1.588.963.200	98,64%
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.961.524.474	3.928.907.349	99,17%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4.414.752.265	4.166.106.197	94,36%
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	541.613.420	531.761.196	98,18%
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	121.256.443	119.487.500	98,54%
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.292.040.431	2.229.139.602	97,25%
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.434.527.671	1.262.491.399	88%
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.314.300	23.226.500	91,75%
Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah				
Fasilitasi Kerjasama Daerah		921.450.000	638.000.000	69,23%
1	Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta	921.450.000	638.000.000	69,23%
BELANJA MODAL		2.541.000.000	2.449.150.000	96,39%
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.541.000.000	2.449.150.000	96,39%
	TOTAL	684.584.394.547	656.181.882.571	95,85 %

Sumber: sistem money bappeda

Jika dibandingkan dengan tahun 2020 penyerapan secara total anggaran tahun 2021 menunjukkan kenaikan dikarenakan kondisi ekonomi global akibat pandemi COVID-19 sudah mulai membaik, yakni meningkat dari 84,81% menjadi 95,85%. Jika melihat kinerja penyerapan Belanja Langsung

maka kinerja penyerapannya mengalami peningkatan, yakni dari 96,19% menjadi 97,09%, peningkatan ini dikarenakan adanya komitmen yang tinggi dari pimpinan dan jajaran SDM di Dinas PM dan PTSP untuk terus meningkatkan kinerjanya serta adanya movev anggaran yang dilaksanakan secara rutin dan intensif untuk mendorong peningkatan realisasi dan adanya upaya antisipasi terhadap penyerapan anggaran yang mengalami hambatan.

Tabel.3.10 Tabel Perbandingan Anggaran Tahun 2020 dan Tahun 2021

Tahun	Anggaran			Penyerapan		
	Belanja Operasi	Belanja Modal	Total	Belanja Operasi	Belanja Modal	Total
2020	529.794.412.438	-	529.794.412.438	84,81%	-	84,81%
2021	682.043.394.547	2.541.000.000	684.584.394.547	96,19%	95,85%	95,85%

Sumber: sistem movev bappeda

C. PENGHARGAAN

Berikut disampaikan penghargaan yang diterima DPMPTSP tahun 2021:

1. DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Pelayanan Prima dengan Nilai Tertinggi (A) dari KemenPANRB Republik Indonesia
2. UP PMPTSP Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Sangat Baik dari KemenPANRB Republik Indonesia
3. Platinum Awards (Juara Umum) dalam Kompetisi Kinerja Kehumasan/ Komunikasi, Public Relations Indonesia Awards (PRIA) 2021
4. Best Presenter Kategori Pemerintah Provinsi : Rinaldi, S.I.Kom., M.Si. Kepala Seksi Penyuluhan DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta dalam Kompetisi Kinerja Kehumasan/ Komunikasi, Public Relations Indonesia Awards (PRIA) 2021
5. Gold Winner Departemen PR : Kinerja Penyuluhan / Komunikasi Masyarakat DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta dalam Kompetisi Kinerja Kehumasan/ Komunikasi, Public Relations Indonesia Awards (PRIA) 2021

6. Gold Winner Penanganan Krisis Perizinan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) DKI Jakarta dalam Kompetisi Kinerja Kehumasan/ Komunikasi, Public Relations Indonesia Awards (PRIA) 2021
7. Gold Winner Program Government PR : Kampanye Publik Urus Izin #BisaDariRumah, Urus Izin Sendiri itu Mudah dalam Kompetisi Kinerja Kehumasan/ Komunikasi, Public Relations Indonesia Awards (PRIA) 2021
8. Gold Winner (Public Relations Value) Aplikasi Perizinan Daring Jakarta Evolution (JakEvo) dalam Kompetisi Kinerja Kehumasan/ Komunikasi, Public Relations Indonesia Awards (PRIA) 2021
9. Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta
10. Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2015 terdaftar Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan Internasional Accreditation Forum (IAF)
 1. Sistem Manajemen Mutu Ruang Lingkup Layanan Penyuluhan dan Pengaduan
 2. Sistem Manajemen Mutu Ruang Lingkup Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Bidang Pelayanan I
 3. Sistem Manajemen Mutu Ruang Lingkup Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Bidang Pelayanan I
 4. Sistem Manajemen Mutu Ruang Lingkup Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di UP PMPTSP Kota Administrasi Jakarta Timur
 5. Sistem Manajemen Mutu Ruang Lingkup Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di UP PMPTSP Kecamatan Mampang Prapatan
 6. Sistem Manajemen Mutu Ruang Lingkup Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di UP PMPTSP Kecamatan Kalideres

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2021 disusun sebagai wujud pertanggung jawaban dalam pencapaian visi, misi dan tujuan Instansi Pemerintah, serta dalam rangka perwujudan *good governance*. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan Instansi Pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi Instansi Pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Terdapat empat indikator kinerja yang termuat dalam Perjanjian Kinerja DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 yang telah diselaraskan dengan dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 dan Rencana Strategis DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 serta program prioritas Pemerintah provinsi DKI Jakarta lainnya. Adapun pencapaian kedua indikator tersebut secara keseluruhan mencapai 100,7 % atau masuk dalam kategori Sangat berhasil. Upaya koordinasi akan terus ditingkatkan dengan *stakeholder* terkait secara lebih intensif, mengingat target indikator hanya dapat dicapai melibatkan segenap instansi daerah dan pusat dalam rangka penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berbasis kinerja dan berorientasi pada hasil, serta untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima.

Melalui laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh pihak terkait dan dapat menjadi bahan evaluasi dalam peningkatan pengelolaan kinerja DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta yang pada akhirnya dapat mewujudkan Visi DPMPTSP untuk menjadi "Solusi Investasi dan Perizinan di Jakarta".

Lampiran

- PERJANJIAN KINERJA DPMPTSP
- DOKUMENTASI LAYANAN MAL PELAYANAN PUBLIK
- DOKUMENTASI LAYANAN AJIB
- DOKUMENTASI LIPUTAN LAYANAN DPMPTSP

PERJANJIAN KINERJA DPMPSTP



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BENNI AGUSCANDRA

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D

Jabatan : Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2021

PIHAK KEDUA,

Gubernur
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D

PIHAK PERTAMA,

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

BENNI AGUSCANDRA
NIP. 196908081997031004

PELAKSANAAN KEGIATAN VISUALISASI PERANGKAT DASAR TAHUN 2017

Date
 04/05/2017
 04/05/2017

Divisi Apresiasi
 Direktorat Perencanaan
 Kepala Dinas
 Dinas Perencanaan, Statistik dan Pelaporan, Tegal, Kab. Pem. Provinsi DIK Jabar

No	Revisi	KID	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pencapaian Kinerja	Tahun					Tindakan	Keterangan	
						1	2	3	4	5			
SAKSIAN STRATEGIS													
1			Pertumbuhan nilai investasi	a. DNP	Stabilitas ekonomi nasional yang berpengaruh terhadap pertumbuhan nilai investasi	94	94	94	94	94	94	94	94
2			Peringkat nilai investasi	a. DNP	Stabilitas ekonomi nasional yang berpengaruh terhadap peringkat nilai investasi	94	94	94	94	94	94	94	94
3			Peringkat nilai investasi	a. DNP	Stabilitas ekonomi nasional yang berpengaruh terhadap peringkat nilai investasi	94	94	94	94	94	94	94	94

<p>4. Kemampuan MA atau pemegang hak keuangan dalam yang beroperasi dan investasi</p>	<p>1. Penilaian Kriteria Penilaian Anggaran</p>	<p>a. 5000</p> <p>Penilaian Kualitas Penilaian Anggaran dilakukan dengan rangkai 3 (tiga) poin yaitu</p> <p>A. Penilaian Anggaran: Komponen ini meliputi kemampuan analisis anggaran berdasarkan anggaran yang telah ditetapkan di lingkungan Pemerintah Daerah. Nilai persentase anggaran minimal adalah 40%. Penilaian anggaran minimal 40% apabila anggaran anggaran > 50%. Apabila anggaran anggaran di bawah 40% maka perhitungan nilai persentase anggaran = (Penilaian Sampai Anggaran x 60%). Anggaran yang diperhitungkan adalah APBD dan BLU, dan tidak termasuk dana transfer dari pemerintah pusat.</p> <p>B. Efisiensi adalah nilai dana yang diperoleh melalui pelaksanaan dan pelaksanaan yang dapat diukur secara efektif. Apabila persentase output lebih rendah 100% maka nilai output tidak dapat. Nilai dana adalah lebih dari persentase anggaran dengan nilai anggaran dimana nilai lebih yang diperoleh untuk lebih efektif berarti nilai lebih dapat diukur.</p> <p>C. Persentase output adalah persentase capaian indikator kinerja pelaksanaan (AKIP). Nilai persentase output dapat dilihat dalam laporan kinerja Anggaran hasil rekapitulasi PDAKPD.</p> <p>Formula penghitungan adalah sebagai berikut</p> <p>1. Dengan Anggaran 40% dan output 100%</p> $\text{Nilai} = 40\% + (40\% \times 100\%) = 80\%$ <p>2. Dengan Anggaran 40% dan output > 100%</p> $\text{Nilai} = (\text{Penilaian Anggaran } \times 40\%) + (\text{persentase output } \times 30\%)$ <p>3. Dengan Anggaran 40%, namun output < 100%</p> $\text{Nilai} = 40\% + (\text{persentase output } \times 30\%)$	<p>60%</p>	<p>60%</p>	<p>60%</p>	<p>50%</p>	<p>50%</p>	<p>Pemeriksaan</p>
<p>5. Integritas dan daya tampung sumber daya manusia dan peningkatan keterampilan yang berkaitan dengannya</p>	<p>1. Penilaian kemampuan sumber daya manusia dan peningkatan keterampilan sumber daya manusia yang berkaitan dengan kegiatan</p>	<p>a. 4000</p> <p>4000</p> <p>Nilai persentase berdasarkan standar yang ditetapkan secara nasional oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri 10.</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>60%</p>	<p>100%</p>	<p>Pemeriksaan</p>
<p>6. Menghindari pencemaran lingkungan</p>	<p>1. Penilaian kemampuan sumber daya manusia dan peningkatan keterampilan sumber daya manusia yang berkaitan dengan kegiatan</p>	<p>a. 4000</p> <p>4000</p> <p>Nilai persentase berdasarkan standar yang ditetapkan secara nasional oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri 10.</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>Pemeriksaan</p>

	<p>1. Penilaian kemampuan sumber daya manusia dan peningkatan keterampilan sumber daya manusia yang berkaitan dengan kegiatan</p>	<p>a. 4000</p> <p>4000</p> <p>Nilai persentase berdasarkan standar yang ditetapkan secara nasional oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri 10.</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>Pemeriksaan</p>
<p>7. Kemampuan berkolaborasi</p>	<p>1. Penilaian kemampuan sumber daya manusia dan peningkatan keterampilan sumber daya manusia yang berkaitan dengan kegiatan</p>	<p>a. 4000</p> <p>4000</p> <p>Nilai persentase berdasarkan standar yang ditetapkan secara nasional oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri 10.</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>Pemeriksaan</p>
<p>8. Kemampuan dalam urusan legal</p>	<p>1. Penilaian kemampuan sumber daya manusia dan peningkatan keterampilan sumber daya manusia yang berkaitan dengan kegiatan</p>	<p>a. 4000</p> <p>4000</p> <p>Nilai persentase berdasarkan standar yang ditetapkan secara nasional oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri 10.</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>Pemeriksaan</p>
<p>9. Kemampuan dalam urusan pengelolaan keuangan dan aset</p>	<p>1. Penilaian kemampuan sumber daya manusia dan peningkatan keterampilan sumber daya manusia yang berkaitan dengan kegiatan</p>	<p>a. 4000</p> <p>4000</p> <p>Nilai persentase berdasarkan standar yang ditetapkan secara nasional oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri 10.</p>	<p>60%</p>	<p>60%</p>	<p>60%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>Pemeriksaan</p>
<p>10. Kemampuan dalam urusan kesehatan lingkungan yang aman, nyaman, nyaman, sehat, dan berkelanjutan yang berkaitan dengan kegiatan</p>	<p>1. Penilaian kemampuan sumber daya manusia dan peningkatan keterampilan sumber daya manusia yang berkaitan dengan kegiatan</p>	<p>a. 4000</p> <p>4000</p> <p>Nilai persentase berdasarkan standar yang ditetapkan secara nasional oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri 10.</p>	<p>100%</p>	<p>60%</p>	<p>60%</p>	<p>60%</p>	<p>100%</p>	<p>Pemeriksaan</p>



SALAM SETIA

SELAMAT PAGI WARGA JAKARTA

Orang sukses mengawali paginya dengan senyuman, segala urusan akan dimudahkan. Yuk kita sambut hari ini dengan penuh semangat. Semangat mengurus izin dan non izin SENDIRI ya

SALAM SETIA #MELAYANIJAKARTA



#MELAYANIJAKARTA

☎ 1500164 🌐 pelayanan.jakarta.go.id 📺 [PelayananJakarta](https://www.facebook.com/PelayananJakarta) 🐦 [@layananjakarta](https://twitter.com/layananjakarta) 📷 [@layananjakarta](https://www.instagram.com/layananjakarta) 📺 [/layananjakarta](https://www.youtube.com/layananjakarta)

SALAM SEYIA

"Duduk diam dirumah, izin usaha selesai.
Makasih PTSP dan Jakpreneur!"

-Salmah Fitriyani,
Pendik. Jajanan Kekerasan



#REKLAYANIJAKARTYA

128334 @reklaya-nija-ja-karta | #reklaya-nija-ja-karta | @reklaya-nija-ja-karta | @reklaya-nija-ja-karta | @reklaya-nija-ja-karta

SALAM SEYIA

LANGKAH
PENCAJUAN IZIN
JAKEVO

JAM AKTIF

SENIN - JUMAT
08.00 - 15.00

[www.jakarta.go.id](#)

- 1. Izin
- 2. Perizinan
- 3. Perizinan
- 4. Perizinan

1. Pengajuan izin

2. Pengisian Formulir

3. Pendaftaran

4. Penyerahan

#REKLAYANIJAKARTYA

Strengthening the Post-Pandemic
Economy through Collaboration



JIF Jakarta Investment Forum

11 – 12
NOVEMBER
2021



International Primary Discussion
Urban Health **Urban Mobility** Networking Session
Urban Tourism



an Experience by



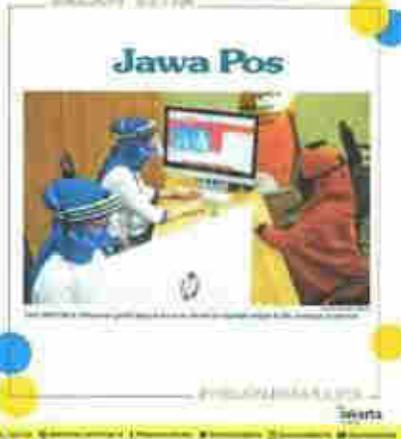
www.jakartainvestmentforum.com



DOKUMENTASI LAYANAN MAL PELAYANAN PUBLIK

beritaPMPSTP

SALAM SETIA



SALAM SETIA



SALAM SETIA



SALAM SETIA



SALAM SETIA



#PILAYANJAKARTA

SALAM SETIA

Tata cara
Pembayaran E-Retribusi
melalui **ATM Bersama,**
Mobile Banking dan
Tokopedia

INFO LEBIH LANJUT >

- 1. Menu
- 2. Pembayaran
- 3. Pembayaran
- 4. Pembayaran
- 5. Pembayaran

#PILAYANJAKARTA

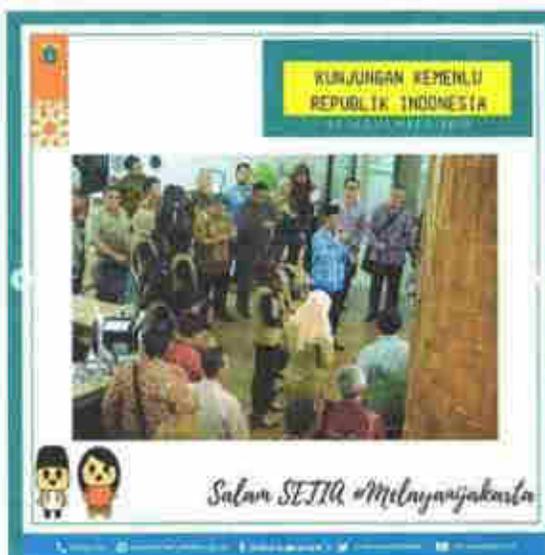
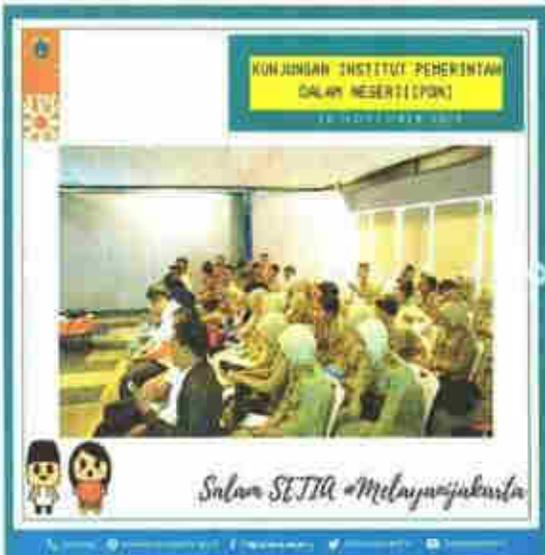
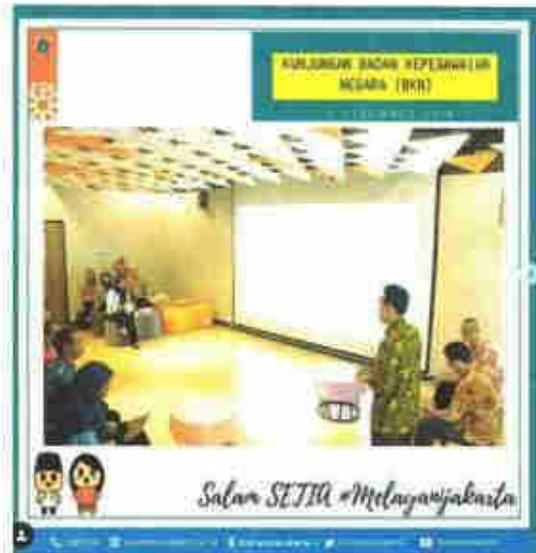
INFO
IZIN OPERASIONAL
BUMAH SAKIT DKN
ADPDK
SUDAH ONLINE DI
www.pilajakarta.go.id

#PILAYANJAKARTA

INFO
IZIN PENGGUNAAN
TANAH MAKAM
SUDAH ONLINE DI
www.pilajakarta.go.id

#PILAYANJAKARTA

DOKUMENTASI KUNJUNGAN DALAM RANGKA BEST PRACTICE LAYANAN DAN INOVASI DPMPSTP



DOKUMENTASI LAYANAN AJIB

Gak Ada Waktu
Urus Izin dan Non Izin?
Di AJIB-in AJA



SALAM SETIA



#SBLAYANIJAKARTA

Website @sblayanijakarta #sblayanijakarta #sblayanijakarta #sblayanijakarta #sblayanijakarta

beritaPMPTSP

SALAM SETIA



#DIAJIBinAja, Urus Izin
"On-line" Jadi Makin Seru



Pada era digital ini, segala sesuatu bisa dilakukan secara online. Tidak terkecuali urusan mengurus izin dan non izin. Dengan hadirnya layanan AJIB (Akses JIBin Aja), proses mengurus izin dan non izin menjadi lebih mudah dan cepat. Layanan ini memungkinkan masyarakat untuk mengurus izin dan non izin secara online, tanpa perlu datang ke kantor. Hal ini sangat membantu masyarakat yang sibuk dan tidak punya waktu untuk mengurus izin dan non izin secara konvensional. Dengan layanan AJIB, masyarakat bisa mengurus izin dan non izin kapan saja dan di mana saja. Ini adalah inovasi yang sangat bermanfaat bagi masyarakat.

#SBLAYANIJAKARTA

Website @sblayanijakarta #sblayanijakarta #sblayanijakarta #sblayanijakarta #sblayanijakarta

DOKUMENTASI LIPUTAN LAYANAN DPMPSTSP

beritaPMPSTSP

SALAH SEYTA

WARTA KOTA

Dinas PMPTST Optimalkan Layanan Daring JakEVO

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus meningkatkan layanan digitalisasi layanan publik. Salah satunya dengan optimalisasi layanan daring JakEVO. Dinas PMPTST Jakarta memastikan layanan ini dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

#PMPSTSP

Jakarta

Twitter Instagram Facebook YouTube

beritaPMPSTSP

SALAH SEYTA

MI MEDIA INDONESIA

Pelayanan Publik Prima selama PSBB

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan pelayanan publik tetap prima selama PSBB. Dengan memanfaatkan layanan digitalisasi, masyarakat dapat mengakses layanan publik dengan mudah dan aman.

#PELAYANIPUBLIK

Twitter Instagram Facebook YouTube

beritaPMPSTSP

SALAH SEYTA

WARTA KOTA

Pengguna SIKM Tembus 1 Juta Orang

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaporkan jumlah pengguna Sistem Informasi Kesehatan Masyarakat (SIKM) telah mencapai lebih dari 1 juta orang. Hal ini menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan digitalisasi kesehatan.

#PELAYANIPUBLIK

Twitter Instagram Facebook YouTube

INVESTOR DAILY

JakEvo, Singkat dan Cegah Calo



Jakarta Evolution (JakEvo) adalah aplikasi layanan publik yang dirancang untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan pemerintah. Dengan menggunakan JakEvo, pengguna dapat melakukan berbagai transaksi secara online dengan cepat dan aman.

Twitter Instagram Facebook YouTube

beritaPMPSTSP

SALAH SEYTA

Kontan



#PELAYANIPUBLIK

Jakarta

Twitter Instagram Facebook YouTube

KOMPAS

JakEvo, Singkat dan Cegah Calo

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meluncurkan aplikasi JakEvo sebagai solusi untuk meningkatkan efisiensi layanan publik. Aplikasi ini dirancang untuk meminimalkan birokrasi dan mencegah praktik calo, sehingga masyarakat dapat menikmati layanan yang lebih transparan dan terjangkau.

Twitter Instagram Facebook YouTube



APLIKASI JAKARTA EVOLUTION MONEY

SPRINT PENGELUARAN APBN - KEMENTERIAN ESDM TINGKATKAN



DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DKI JAKARTA



URUS
IZIN
SENDIRI
ITU
MUDAH

SETIA #PelayananJakarta

Gedung Mall Pelayanan Publik
Jl. HR. Rasuna Said Kav C 22

- ☎ 1500164
- 🌐 pelayanan.jakarta.go.id
- 📘 /Pelayanan.Jakarta
- 🐦 @layananjakarta
- 📷 @layananjakarta
- 📺 /layananjakarta